



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id email: pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang

Jawa Timur 65163

(0341) 399192. (0341) 399194

pa.kab.malang@gmail.com | www.pa-malangkab.go.id



Selamat Datang



Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari 1997 - sekarang



Drs. H. Abu Umar, S.H.
1997-2001



Drs. H. Bambang Ali Muhajir
2001-2004



H. Munardi, S.H.
2004-2007



M. Hasjim, S.H.
2007-2009



Drs. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum
2010-2012



Drs. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.
2012-2017



Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.
2017-2019



Drs. Mujib, M.H.
2019-2020



Drs. Santoso, M.H.
2020-2021



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
2021-2023



Drs. H. Misbah, M.H.I.
2023 - sekarang

PROFIL PIMPINAN



Drs. H. Misbah, M.H.I.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lahir di Sumenep, 03 Desember 1965. Dilantik menjadi Hakim sejak tahun 1998 dan terpilih menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak tahun 2023. Sebelum menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Drs. H. Misbah, M.H.I. menjabat sebagai Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Palopo (2016), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene (2017), Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (2019), Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep (2019), Ketua Pengadilan Agama Sumenep (2020), Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Malang (2020) dan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dari tahun 2021 sampai tahun 2023.



H. A. Zahri, S.H., M.H.I. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lahir di Lamongan, 10 Mei 1963. Dilantik menjadi Hakim sejak tahun 2005 dan terpilih menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak tahun 2024. Sebelum menjabat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, H. A. Zahri, S.H., M.H.I. menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (2014), Ketua Pengadilan Agama Polewali (2017), Ketua Pengadilan Agama Luwuk (2017), Ketua Pengadilan Agama Trenggalek (2020), Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan (2022) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi tahun (2023).

HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG



Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum



Drs. Achmad Suyuti, M.HES.



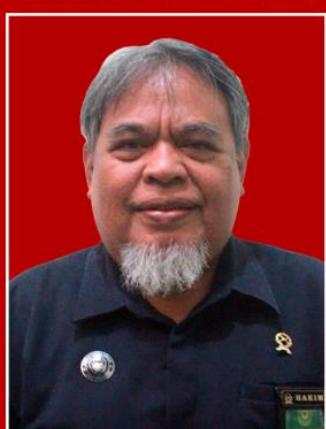
Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.



Drs. Abd. Rouf, M.H.



Drs. Munasik, M.H.



Drs. Muhammad Zainuri, M.H.



Drs. H. Shobirin, M.H.



Drs. AH. Fudloli, M.H.



Drs. A. Bashori, M.A.



Wahib Latukau, S.H.I.



Kholid Darmawan, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2024 - sekarang



Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP.
Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2024 - sekarang

PANITERA MUDA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG



Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum



Idha Nur Habibah, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan



Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan

KEPALA SUB BAGIAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG



Buyung Tumanggor, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan



Junaidi Syampurno, S.H.
Kasubbag Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan



Khusnul Aini, S.H., M.H.
Kasubbag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana

PERISTIWA PENTING 2024

Januari



Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Apresiasi Integritas & Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Drs. H. Damsir, S.H., M.H. meninjau pelayanan serta fasilitas kantor PA Kab. Malang, beliau mengapresiasi integritas dan kinerja PA Kab. Malang dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Februari

PA Kab. Malang Berhasil Meraih 5 Penghargaan pada PTA Surabaya Awards

PA Kab. Malang juga meraih 5 Penghargaan yakni:

1. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2. Peringkat Terbaik I dalam Bidang Kinerja Pemanfaatan Gugatan Mandiri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023
3. Peringkat Terbaik II dalam Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara Lebih dari 5.000 Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2023
4. Peringkat Terbaik II dalam Bidang E-Court Tingkat Banding di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama



Februari



Malam Anugerah PA Kab Malang Awards dan Tasyakuran Predikat WBK Tahun 2023

PA Kab. Malang menyelenggarakan acara Malam Anugerah PA Kab Malang dan Tasyakuran Predikat WBK Tahun 2023 bertempat di Semilir Resort, Tulungagung. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh seluruh Aparatur PA Kab. Malang.

Maret

Ramadhan Penuh Berkah Bersama PA Kab. Malang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan sosial yakni pembagian santunan kepada anak yatim & kaum dhuafa yang diikuti oleh seluruh pegawai dimulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh karyawan/karyawati PA Kabupaten Malang tak terkecuali. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Ibu-ibu anggota Dharmayukti Karini PA Kabupaten Malang



PERISTIWA PENTING 2024

April



PA Kab Malang Raih Beberapa Kategori Penghargaan Oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

PA Kab. Malang meraih beberapa kategori penghargaan dari Ditjen Badilag yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI - Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. yakni:

1. Juara I Mediasi Terbanyak Tahun 2023
2. Juara I dan Juara III Mediator terbaik Tahun 2023
3. Predikat WBK Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023
4. Juara I Nilai Rapor SIPP berturut-turut selama 1 Tahun Pengadilan Tingkat Pertama 2023
5. Juara II Pemanfaatan Aplikasi Gugatan Mandiri Terbanyak Tahun 2023.

April

Halal Bi Halal Keluarga Besar PA Kab Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan Halal Bi Halal yang diselenggarakan di Hotel Grand Miami Kepanjen dan dihadiri oleh seluruh pegawai dan para pensiunan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimulai dari Pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Karyawan/Karyawati. Turut hadir pada kegiatan tersebut pegawai bursa PA Kab. Malang serta Ibu-Ibu Dharma Yukti Karini PA Kab Malang



Mei



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua PA Kab. Malang

Ketua PA Kab. Malang - Drs. H. Misbah, M.H.I. melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua PA Kab. Malang - H. A. Zahri, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat menjadi Wakil Ketua PA Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Graha Unesa Surabaya.

Mei

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris PA Kab. Malang

Ketua PA Kab. Malang - Drs. H. Misbah, M.H.I. melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris PA Kab. Malang - Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P yang sebelumnya menjabat menjadi Sekretaris PA Jombang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Miami Kepanjen, Malang.



PERISTIWA PENTING 2024

Juni



Badan Pengawasan (BAWAS) MA-RI Laksanakan Pemeriksaan Reguler di PA Kab. Malang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan kunjungan dari Badan Pengawasan MA - RI. Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan pemeriksaan regular pada PA Kab. Malang. Ruang lingkup pemeriksaan yang dimaksud meliputi manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum.

Juli

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera PA Kab. Malang

Ketua PA Kab. Malang - Drs. H. Misbah, M.H.I. melantik dan mengambil sumpah jabatan Panitera PA Kab. Malang - Kholid Darmawan, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat menjadi Panitera PA Lumajang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hall Hotel Grand Kanjuruhan, Kepanjen, Malang.



Juli



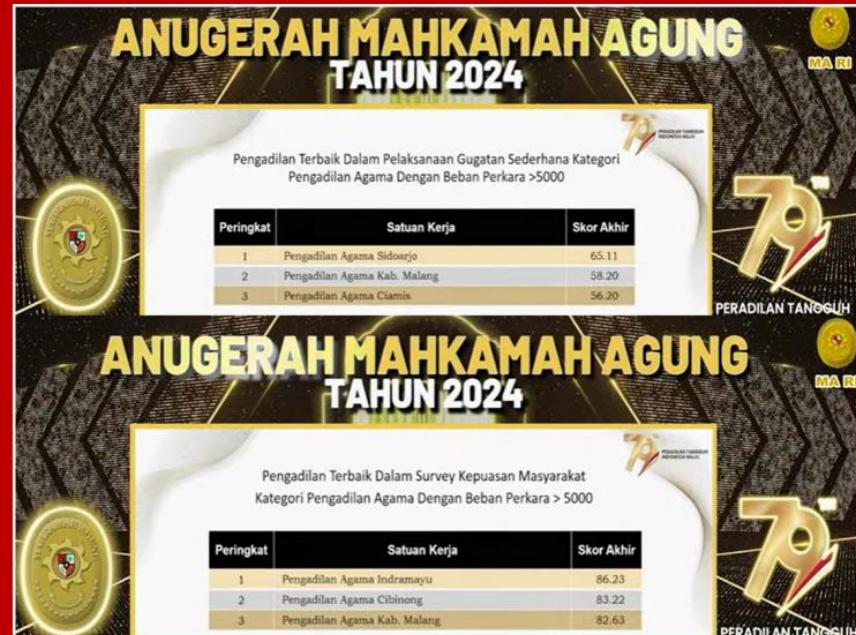
PA Kab Malang Raih Peringkat Terbaik SIPP dan Pengelolaan Banding

Pengadilan Agama Kab. Malang kembali mendapatkan prestasi dengan meraih Peringkat Terbaik 1 kategori Gugatan Mandiri dalam ajang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Awards. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. Prestasi yang diraih ini merupakan bukti nyata PA Kab. Malang mempertahankan komitmen pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Agustus

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Raih Penghargaan pada Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024

Ketua PA Kab. Malang - Drs. H. Misbah, M.H.I didampingi oleh Plt. Sekretaris PA Kab. Malang - Buyung Tumanggor, S.Kom menerima penghargaan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Bertempat di Balairung Mahkamah Agung RI - Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI - Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.



PERISTIWA PENTING 2024

September



Studi Tiru Wilayah Bebas dari Korupsi PA Tulungagung di PA Kab. Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan kunjungan dari Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka studi banding Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Oktober

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Resmikan Inovasi Pojok JALIBAR PA Kab. Malang

Ketua PTA Surabaya - Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. meresmikan inovasi baru PA Kab. Malang yakni Pojok JALIBAR yang merupakan akronim dari Jalur Layanan Isi Angin Ban dan Air. Inovasi ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.



November



PA Kab. Malang Laksanakan Penyuluhan Hukum Bekerjasama Dengan Instansi Terkait

Ketua PA Kab. Malang - Drs. H. Misbah, M.H.I. menjadi narasumber pada penyuluhan hukum di Desa Kluwut, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan secara rutin dari satu Desa ke Desa lainnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta merupakan salah satu bentuk pengabdian PA Kab. Malang kepada masyarakat

Desember

PA Kab. Malang Berikan Penghargaan Kepada Pegawai PPNPN dan Tenaga Kontrak Terdisiplin

PA Kab. Malang mengapresiasi para pegawai yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme dengan memberikan penghargaan kepada pegawai PPNPN (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Non-PNS) dan Tenaga Kontrak yang menunjukkan kedisiplinan luar biasa selama tahun 2024.



DAFTAR ISI	
Sekapur Sirih	i
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan	
Keadaan Perkara	22
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum /Agama /Miltun	22
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	22
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	23
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	23
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
B. Penyelesaian Perkara	25
- Jumlah sisa perkara yang diputus	25
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	25
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,	
Kasasi dan PK	27
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	28
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	
C. Program Prioritas Nasional	29
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	29
- Sidang keliling / pelayanan terpadu	31
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	31
BAB III Sumber Daya Manusia	
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan /golongan /pendidikan ..	32

- Mutasi	33
- Promosi	34
- Pensiun	34
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)	34
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan	37
B. Pengelolaan Sarana dan Prasana	41
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	48
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan	48
Umum / Agama /Miltun	48
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan	51
Umum /Agama /Miltun	51
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	
- Pembangunan Zona Integritas	53
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	55
- Inovasi Pelayanan Publik	56
BAB VI Pengawasan	
A. Internal	65
B. Evaluasi	71
BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi	
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	76
C. Penutup.....	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Data Jenis Perkara Yang Diterima Tahun 2024
Lampiran 2 : Data Jenis Perkara Yang Diputus Tahun 2024
Lampiran 3 : Data Jenis Perkara Tundaan Tahun 2024
Lampiran 4 : Data Perkara Yang Belum Diminutasi
Lampiran 5 : Putusan Yang Diajukan Banding
Lampiran 6 : Perkara Yang Diajukan Kasasi
Lampiran 7 : Perkara Yang Diajukan Peninjauan Kembali
Lampiran 8 : Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2024
Lampiran 9 : Rekapitulasi Layanan Posbakum 2024
Lampiran 10 : Statistik PNS
Lampiran 11 : Statistik Tenaga Honorer
Lampiran 12 : Mutasi Kenaikan Pangkat
Lampiran 13 : Mutasi kenaikan gaji berkala
Lampiran 14 : Daftar Mutasi Pegawai masuk
Lampiran 15 : Daftar Mutasi Pegawai keluar
Lampiran 16 : Daftar Cuti Pegawai
Lampiran 17 : Promosi Pegawai
Lampiran 18 : Daftar Pensiun Pegawai
Lampiran 19 : Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial
Lampiran 20 : Data Tenaga Teknik Yudisial
Lampiran 21 : Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial
Lampiran 22 : Data Tenaga Non Teknis
Lampiran 23 : Rincian Belanja Pegawai
Lampiran 24 : Rincian Belanja Barang
Lampiran 25 : Rincian Belanja Modal
Lampiran 26 : Rincian PNBP DIPA 01 Tahun 2024
Lampiran 27 : Rincian DIPA 04 Tahun 2024
Lampiran 28 : Rincian PNBP DIPA 04 Tahun 2024
Lampiran 29 : Matrik Barang Inventaris
Lampiran 30 : Data Surat Masuk Tahun 2024
Lampiran 31 : Data Surat Keluar Tahun 2024

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024 ini dengan baik dan tepat waktu.

Tak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang turut serta membantu dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024 sehingga dapat terselesaikan secara paripurna.

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini tentu masih ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan dari semua pihak guna sempurnanya penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini bermanfaat bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya serta merupakan sarana evaluasi dalam menentukan kebijakan kedepan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dapat menjadi sarana pembelajaran maupun penelitian baik bagi para peneliti ataupun Mahasiswa yang tengah menyelesaikan studinya.

Kepanjen, 31 Desember 2024
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang



Drs. H. Misbah, M.H.I.
NIP. 19651203.199003.1.001



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia mempunyai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai pilar *pertama* yang merupakan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, kemudian pilar *kedua* adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi dasar Negara Indonesia. Pilar *ketiga*, adalah NKRI, bahwa Republik Indonesia kuat karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan pilar *keempat* atau yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Empat pilar tersebut merupakan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam masyarakat.

Pemisahan kekuasaan negara yang digunakan menganut konsep trias politika yang berarti ada tiga (3) tonggak kekuasaan yang sejajar dan beriringan dalam membangun NKRI yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

- a. Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
- b. Legislatif adalah membuat undang-undang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- c. Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang yaitu ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Kekuasaan Yudikatif atau yang kemudian jamak dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman berkewajiban untuk mempertahankan Undang-undang (UU) dan berhak untuk memberikan Peradilan secara berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sejak era reformasi hingga sekarang terdapat banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan, baik kultur demokrasinya, sistem pemilu, maupun pembagian kekuasaan. Pada Kekuasaan Yudikatif, perubahan yang paling mendasar dalam sistem Peradilan adalah penyatuatapan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI Reformasi di bidang Peradilan tersebut diawali pada Amandemen ke-3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945,

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi : “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, dan pada ayat (2) berbunyi : “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, “*Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 berbunyi, “*Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung*”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “*Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing - masing*”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berlakunya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membuat tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut, tentu membawa konsekuensi logis terhadap

pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan baik dari sisi administratif, personil (SDM), finansial maupun sarana dan prasarana.

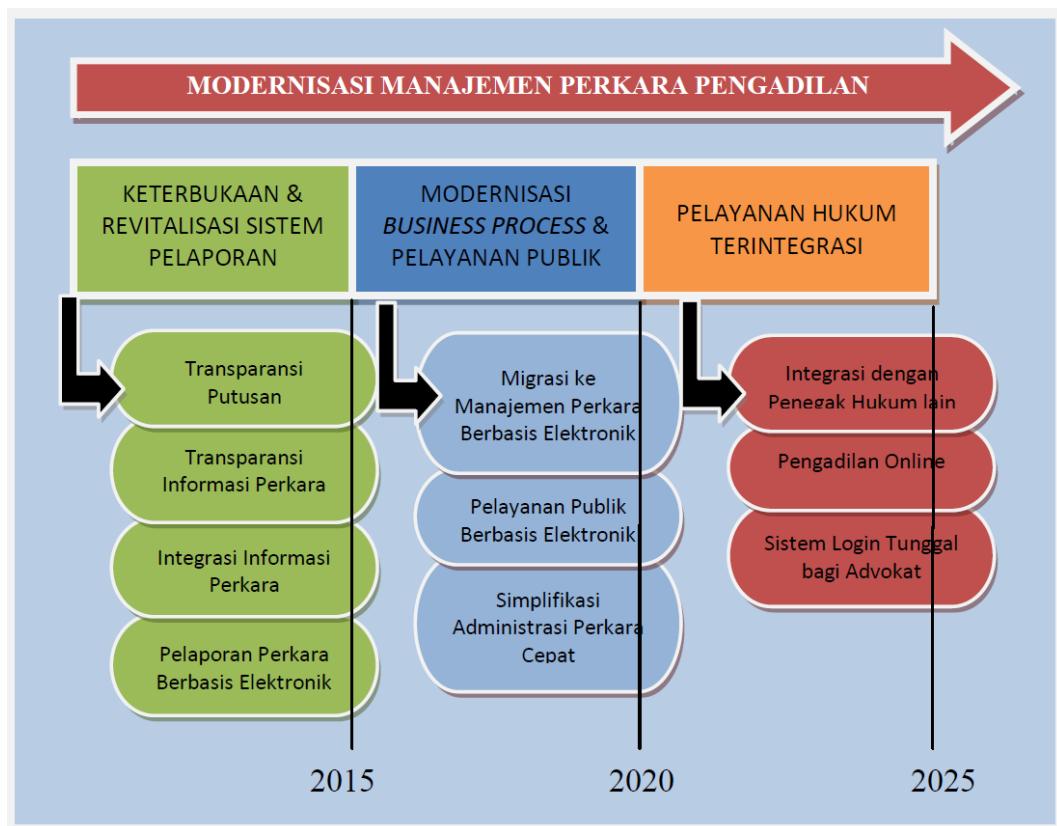
Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Hukum Kabupaten Malang. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Program dan kebijakan Mahkamah Agung tersebut dituangkan kedalam Cetak biru (Blue Print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra) Tahun 2020-2024 yang merupakan tolak ukur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan saat ini telah disusun untuk rencana strategis 2025-2029 sebagai pijakan menyusun rencana kerja di 2025.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, administrasi perkara, arah kebijakan strategis berikut rencana strategis dan pengelolaan anggaran APBN serta penyediaan sarana prasarana, inovasi-inovasi serta prestasi-prestasi yang dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ketua Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut guna penyempurnaan di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya serta masyarakat umum dan akademisi. Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2024 secara rinci akan terurai dalam bab-bab selanjutnya.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pelayanan Hukum Terintegrasi adalah program prioritas Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 untuk kurun waktu 5 tahun ketiga antara tahun 2022-2025.



Area tersebut menjadi penting dalam mencapai pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan mengingat setelah berhasil pada etape pertama dan kedua yakni fase Keterbukaan dan Revitalisasi Sistem Pelaporan dan fase Modernisasi Business Process dan Pelayanan Publik, maka Peradilan Agama terus melakukan pembaruan kearah yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yakni menjadi Peradilan yang modern dan mampu memberikan Pelayanan Hukum terintegrasi kepada para pihak berperkara dengan mengintegrasikan layanan dengan Penegak Hukum lain, adanya Pengadilan online serta Sistem Login Tunggal bagi Advokat atau dikenal dengan Sistem SSO (Single Sign On) seiring telah terciptanya sebuah system Manajemen perkara berbasis elektronik (*e-court*), Ruang Sidang Elektronik dan Pelayanan Hukum Terpadu.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya menjadi *agent of change* (agen perubahan) telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam sistem Peradilan dengan meningkatkan kualitas Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama (setara ISO 9001:2015) dengan cakupan 7 (tujuh) kriteria *Indonesian Court Performance* (-) *Excellent* (ICP-E) yakni Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Sistem Dokumen, Manajemen Sumberdaya, Manajemen Proses dan Hasil Kinerja. Dalam mempertahankan sertifikasi Akreditasi ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula mendapatkan audit eksternal dari Komisi Akreditasi Nasional Badilag pada bulan November 2021 dan telah pula merampungkan hasil dari surveillance eksternal tersebut dengan membenahi beberapa dokumen kerja yang telah dibuat sebelumnya, dengan harapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan berhasil mempertahankan Akreditasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas dan bertindak sebagai pelopor instansi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang bersama-sama dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Kepolisian Resort Kepanjen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang di Tahun 2018 yang lalu. Artinya pada tahun 2024 adalah tahun ke 6 telah melakukan pembangunan zona integritas untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi.

Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM ini penting dilakukan mengingat didalamnya mengandung unsur-unsur penguatan terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi. Adanya proses transparansi yang selalu ditunggu - tunggu oleh masyarakat pencari keadilan juga menjadi kata kunci dalam pembangunan Zona Integritas tersebut. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat ditunaikan secara transparan oleh lembaga Peradilan dalam sinergi terhadap reformasi birokrasi sehingga dengan demikian para pencari keadilan dapat lebih mengetahui secara

detil tentang perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi kepada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan, Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2-144/KMA/SK/VIII/2022 sebagai perubahan peraturan nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik. Termasuk di dalamnya beberapa keputusan setingkat Dirjen yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Sk Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI nomor 1812/DJA/HM.00/6/2021 tentang peningkatan kualitas pelayanan.

Kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, khususnya Peradilan Agama semakin menguat dalam beberapa dekade namun upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan harus terus berjalan. Berangkat dari ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menindaklanjuti dengan menerapkan *Standard Operational Prosedure (SOP)* sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/113/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang SOP dengan beberapa turunan penganti untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Dan di awal tahun 2025 telah ditetapkan jadwal untuk melakukan reviu

SOP Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai penyesuaian atas regulasi terbaru.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertangungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, maka aparatur Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tupoksinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya melakukan terobosan guna menciptakan pelayanan yang lebih mudah, efektif dan efisien serta terjangkau kepada seluruh masyarakat pencari keadilan. Terobosan dimaksud dapat melalui inovasi-inovasi terbaru untuk mempermudah pelayanan para pihak berperkara, dapat berupa perubahan roleplay / SOP di bidang pelayanan publik sehingga tercipta layanan yang cepat dan tepat sasaran maupun dengan melakukan kerjasama lintas sektoral. Ketua PA Kab. Malang mengadakan perjanjian kerjasama lintas sektoral dengan 4 (empat) instansi secara sekaligus, yakni Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (LP3M UB). Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) untuk mewujudkan Pengadilan yang inklusi. Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang dalam hal akses pertukaran informasi data secara valid terhadap pihak- pihak berperkara. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang untuk saling bersinergi dalam memberikan layanan pojok konseling.

Ketua PA Kab. Malang – Drs. H. Misbah, M.HI. dengan jajaran telah berkomitmen mempertahankan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Inklusif yaitu dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan gencarnya pembangunan sarana dan prasarana disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya tahun 2024 telah dilakukan penambahan fasilitas khusus difable di ruang tunggu luar. Memperkuat penghargaan yang dicapai pada bulan Februari 2021 dari Kemenpan RB (Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus.



Gambar 1. Piagam Penghargaan Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 dari Kemenpan RB

Dimana sebelumnya layanan disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama – Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag - Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H., Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya – H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. bersama tim dari Ditjen Badilag dan PTA Surabaya.



Gambar 2. *kika*, Sekretaris PTA Surabaya, Panitera PTA Surabaya, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, Direktur Jenderal Badilag, Ketua PTA Surabaya, Ketua PA Kab Malang dan Wakil Ketua PA Kab. Malang saat peresmian Layanan Disabilitas di PA Kab. Malang.

Tahun 2024 melanjutkan penghargaan yang berhasil diraih yaitu predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA. Penghargaan tersebut ditayangkan pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB. Maka segala upaya untuk melanjutkan pelayanan prima terus dilakukan.



Gambar 3. PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA

Tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertekad mempertahankan pencapaian predikat WBK, setelah 2023 mendapatkan anugerah sebagai satuan kerja yang meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja tanggal 4 Desember 2023. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mendapatkan nilai total sejumlah 92,09 dan mendapatkan nilai tertinggi nomor 2 dari 60 Satuan Kerja. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan setelah sebelumnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang melewati berbagai tahapan dimulai dari seleksi administrasi, Desk Evaluation (analisis dokumen dan wawancara), validasi dan pengolahan survey, evaluasi lapangan hingga panel final dan *clearance*.



Gambar 4. PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Hal itu sudah sejalan dengan Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas

dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya pelayanan prima dan keterbukaan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara :

1. Memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang berada di luar Kabupaten Malang dengan Ruang Sidang Keliling dimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan DIPA TA 2024 untuk sidang diluar gedung sebesar Rp. 48.140.000,- (empat puluh satu delapan ratus ribu rupiah);
2. Mendukung kinerja pelayanan untuk para pencari keadilan dimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan anggaran DIPA TA 2024 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) untuk sarana disabilitas;
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar sesuai SOP terutama pada area-area pelayanan publik baik Posbakum, Mediasi, ruang PTSP dan ruang Sidang;
4. Menempelkan pengumuman tentang Jadwal Antrian Sidang (Maskarebet) baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada website resmi Pengadilan;
5. Menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada website resmi Pengadilan;
6. Melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
7. Melakukan sosialisasi pendaftaran Perkara melalui E-Court Mahkamah Agung RI bagi Pengguna terdaftar lainnya setelah ditahun sebelumnya berhasil mensosialisasikan Pengguna Terdaftar (Advokat) agar berperkara melalui e-Court;
8. Dengan penyempurnaan terhadap perangkat kerja dan personil yang berada di area pelayanan publik PTSP serta membuat role play tentang disiplin dan tupoksi sehingga pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kab. Malang bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 2023;

9. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui website resmi Pengadilan dengan beberapa layanan yang efisien dan efektif seperti Telescop, Jadwal Sidang Maskarebet, Survey Online, Informasi Perkara serta tautan-tautan layanan Peradilan dan informasi Hukum yang memadai untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dan masyakarat pada umumnya;
10. Arema Plus, yakni Inovasi terkini yang dapat mengakses ruang tunggu secara mandiri dan aman dengan kartu Arema yang telah diberikan saat pendaftaran perkara;
11. Maskarebet, antrian sidang secara otomatis tanpa ribet yang terpublish pada website Pengadilan dan terpampang pada papan pengumuman;
12. Antrian PTSP, dengan media informasi perkara melalui TV Media yang tersedia di ruang tunggu PTSP;
13. Informasi perkara lainnya seperti bentangan poster, pamphlet dan brosur;
14. Informasi perkara otomatis melalui SMS gateway dengan aplikasi SPS (system pengingat sidang) dan layanan lainnya seperti pengambilan Akta Cerai, pengambilan salinan putusan dll termasuk didalamnya Whatsapp dan Arema Plus Mobile untuk aplikasi smartphone;
15. Aplikasi ATR (Audio text to Recording), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas proses persidangan, yang mampu merekam seluruh pembicaraan yang ada dalam persidangan langsung dalam bentuk teks, dan dalam update terakhir, ATR telah mampu merekam gambar bergerak para pihak dan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam format suara (*.webm) demi menjamin keterbukaan dan validitas data persidangan;
16. Adanya kotak saran sebagai upaya perbaikan yang komprehensif ataupun melalui online dengan cara mengirim pesan secara langsung kepada Petugas Meja Informasi;
17. Meja Informasi Online yang bisa diakses oleh para pihak berperkara untuk mengirim pesan kepada petugas meja informasi yang tersedia di website;
18. Sarana dan prasarana disabilitas yang dibangun di lingkungan kantor PA Kab. Malang untuk mempermudah para pihak berperkara penyandang disabilitas dalam berperkara;

19. Akurasi dan ketepatan waktu pelaksanaan Anggaran DIPA sehingga didapat output dan outcome secara maksimal sesuai ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Di samping hal-hal yang telah diupayakan di atas, dalam hal pelayanan publik dan persidangan, Pengadilan telah memiliki 2 (dua) SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yang masuk dalam Prolegnas dan dibiayai oleh DIPA tahun anggaran 2024 yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara.
2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum.
3. Sidang Keliling turun ke daerah atau wilayah yang sulit dijangkau atau marginal di Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI, sampai akhir tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanfaatkan dan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.6.4.

Di samping itu, agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif, telah ditunjuk petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 3127/KPA.W13-A35/SK/HM.02.3/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Susunan Tim Pengelola dan Inovasi Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja, maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan : 5070/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/XI/2024 tanggal 11 November

2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”***.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni :

- a. **P**rofesional.
- b. **A**kuntabilitas.
- c. **S**antun.
- d. **T**ransparan.
- e. **I**novatif.
- f. **B**ermartabat
- g. **I**ntegritas.
- h. **S**emangat.

i. **A**manah.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut berada dalam 7 (tujuh) area yakni :

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management Pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan-kebijakan Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien,transfaran dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan

6. Area keterjangkuan.

Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

1. Penyelesaian perkara

2. Manajemen SDM

3. Pelayanan Publik

4. Pelayanan Meja Informasi
5. Pengawasan / Pengaduan
6. Pengelolaan website
7. Pendaftaran perkara melalui E Court
8. Penguatan SIPP dan
9. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Di samping itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan 6 (enam) Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi dengan tools Pembangunan Zona Integritas yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
4. Penguatan Pengawasan
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditunjang dengan aturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab

7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 4 (empat) rencana strategis yang tertuang pada RENSTRA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website ataupun yang berbasis *web server*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi Pengadilan.
4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya yakni :

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;
2. **Membangun Budaya Kerja Profesional**, yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor :

071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juncto Perma Nomor 7 Tahun 2019 serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan memberikan penghargaan (*Reward*), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**, yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang dimiliki Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, jadwal sidang, salinan putusan, juga yang berkaitan dengan organisasi Pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi lebih mudah dan murah. Di samping itu pula adanya *live chat* atau pesan singkat secara *online* telah pula diterapkan dalam *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjangkau pertanyaan-pertanyaan singkat oleh masyarakat pencari keadilan secara cepat dan mudah, Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparatur Pengadilan ataupun masyarakat yang nakal menjadi "calo perkara".
4. **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**, yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus

dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan***, yaitu tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.
6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan***, yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan

manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya - upaya tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan***, yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan Peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam Badan Peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



BAB II

BAB II

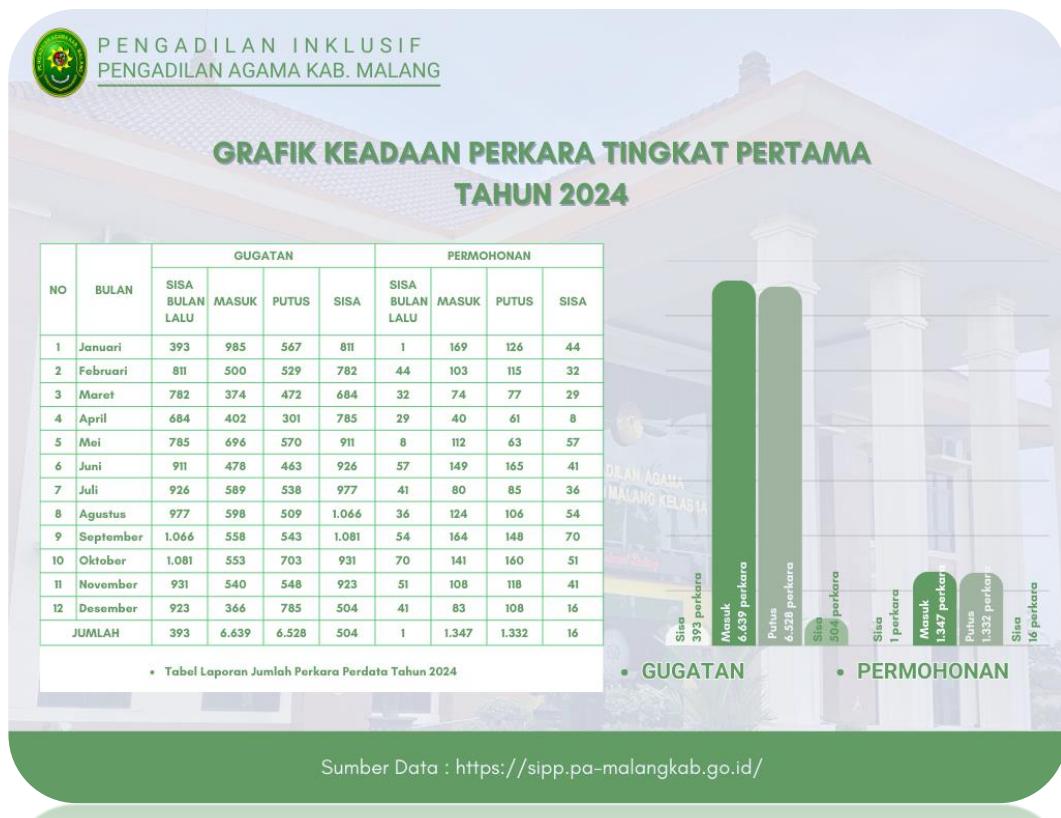
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

A. KEADAAN PERKARA

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1 (satu) perkara. Pada tahun 2024 menerima perkara sejumlah 7.986 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) perkara. Sehingga total perkara yang ditangani sejumlah 8.380 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh) perkara. Dari total perkara tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 telah memutuskan 7.860 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 6.528 (enam ribu lima ratus dua puluh delapan) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun ini sejumlah 520 (lima ratus dua puluh) perkara terdiri dari 504 (lima ratus empat) perkara gugatan dan 16 (enam belas) perkara permohonan.

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 3 (tiga) perkara. Pada tahun 2024 telah menerima permohonan upaya hukum banding sejumlah 30 (tiga puluh) perkara dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 29 (dua puluh sembilan) perkara sehingga terdapat sisa 4 (empat) perkara dengan rincian 3 (tiga) perkara telah terkirim dan 1 (satu) perkara masih dalam proses.

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 mempunyai sisa perkara Kasasi yang belum selesai sejumlah 2 (dua) perkara. Pada tahun 2024 telah menerima permohonan upaya hukum Kasasi sejumlah 12 (dua delas) perkara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sejumlah 4 (empat) perkara sehingga terdapat sisa 10 (sepuluh) perkara, dengan rincian 7 (tujuh) perkara telah terkirim dan 3 (tiga) perkara masih dalam proses. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki sisa perkara Peninjauan Kembali yang belum selesai sejumlah 2 (dua) perkara dan pada tahun ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 3 (tiga) perkara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sejumlah 4 (empat) perkara sehingga terdapat sisa 1 (satu) perkara, dengan rincian 1 (satu) perkara telah terkirim.

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 memiliki sisa perkara yang belum selesai sebanyak 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1 (satu) perkara. Dari jumlah sisa tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 dapat menyelesaikan 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) perkara dan telah terselesaikan pada tahun ini, sedangkan sisa perkara yang diajukan banding tahun 2023 dan belum diputus pada tahun 2024 sebanyak 0 (nol) perkara, sisa perkara yang diajukan kasasi tahun 2023 dan belum diputus hingga tahun 2024 sebanyak 0 (nol) perkara serta sisa perkara yang dimohonkan PK tahun 2023 dan belum diputus hingga tahun 2024 sebanyak 0 (nol) perkara.

- **Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sebanyak 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1 (satu) perkara, sedang pada tahun 2024 menerima perkara sebanyak 7.986 (tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 6.639 (enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) perkara dan perkara permohonan sebanyak 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh) perkara. Total keseluruhan jumlah perkara yang ditangani sebanyak 8.380 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh) yang perkara terdiri dari 7.032 (tujuh ribu tiga puluh dua) perkara gugatan dan 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) perkara permohonan. Pada tahun 2024, perkara yang diterima mengalami **penurunan** sebanyak 1.056 (seribu lima puluh enam) perkara atau 12% (dua belas persen) apabila dibandingkan dengan penerimaan perkara

pada tahun 2023 yang diterima sebanyak 9.042 (sembilan ribu empat puluh dua) perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2024 sebanyak 7.860 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) perkara dari 8.380 perkara atau 93,79% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan persen) yang terdiri dari 6.528 (enam ribu lima ratus dua puluh delapan) perkara gugatan dan 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) perkara permohonan sebagaimana matrik terlampir, sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) perkara atau 6,21% (enam koma dua puluh satu persen) terdiri dari 520 (lima ratus dua puluh) perkara gugatan dan 16 (enam belas) perkara permohonan, dengan demikian pada tahun 2024 rasio tunggakan (sisa perkara) 6,21% (enam koma dua puluh satu persen) atau lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya 4,36% (empat koma tiga puluh enam persen).

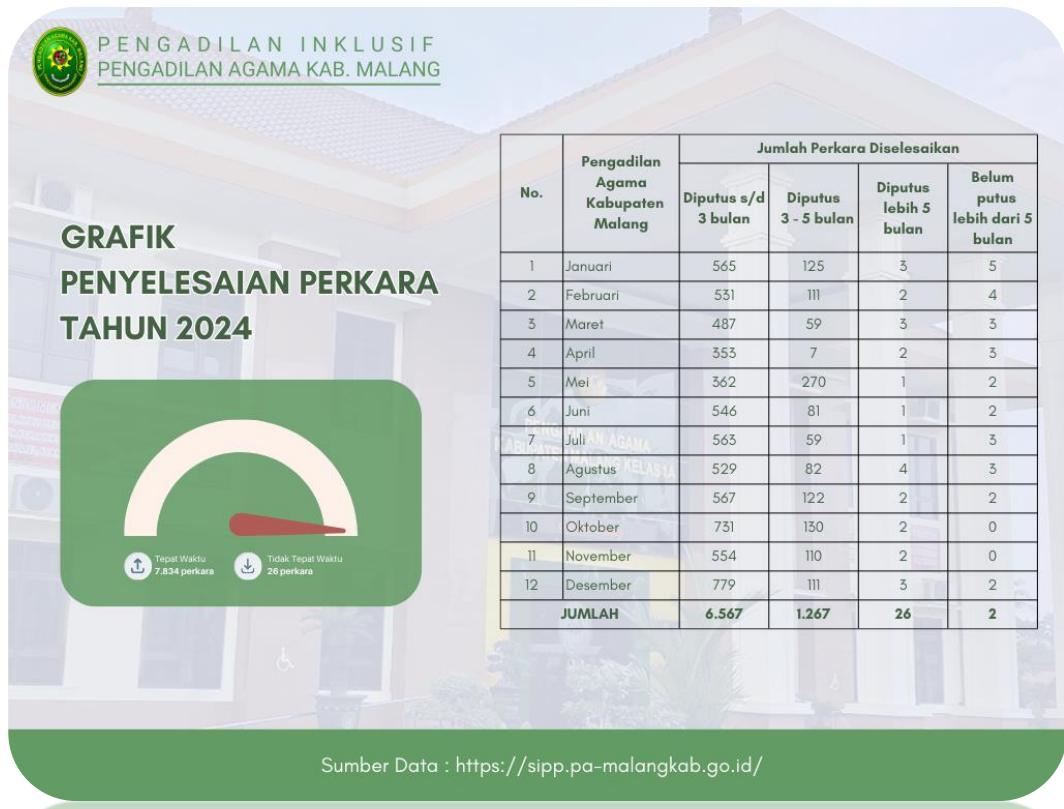
Dari jumlah sisa perkara tahun 2023 ditambah perkara yang diterima pada tahun 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menangani perkara sebanyak 8.380 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh) dan telah memutus sebanyak 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) perkara secara tepat waktu serta 26 (dua puluh enam) perkara tidak tepat waktu (diputus lebih dari 5 bulan) karena salah satu pihak ghoib, PNS dan anggota TNI/POLRI, sehingga jumlah seluruhnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebanyak 7.860 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) perkara.

Rincian jenis perkara yang diterima pada tahun 2024 terbaca pada **Lampiran 1**, rincian jenis perkara yang diputus pada tahun 2024 dapat dilihat pada dalam **Lampiran 2**, sedang sisa perkara tundaan menurut jenisnya ada pada **Lampiran 3** dan matrik terlampir.

Adapun perkara putus tahun 2024 sebanyak 7.860 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) perkara dan yang telah diminutasi sebanyak 7.860 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) perkara. perkara (100%), sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sebanyak 0 (nol) perkara

(0%), sebagaimana (*Lampiran 4*) dan matrik terlampir.

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

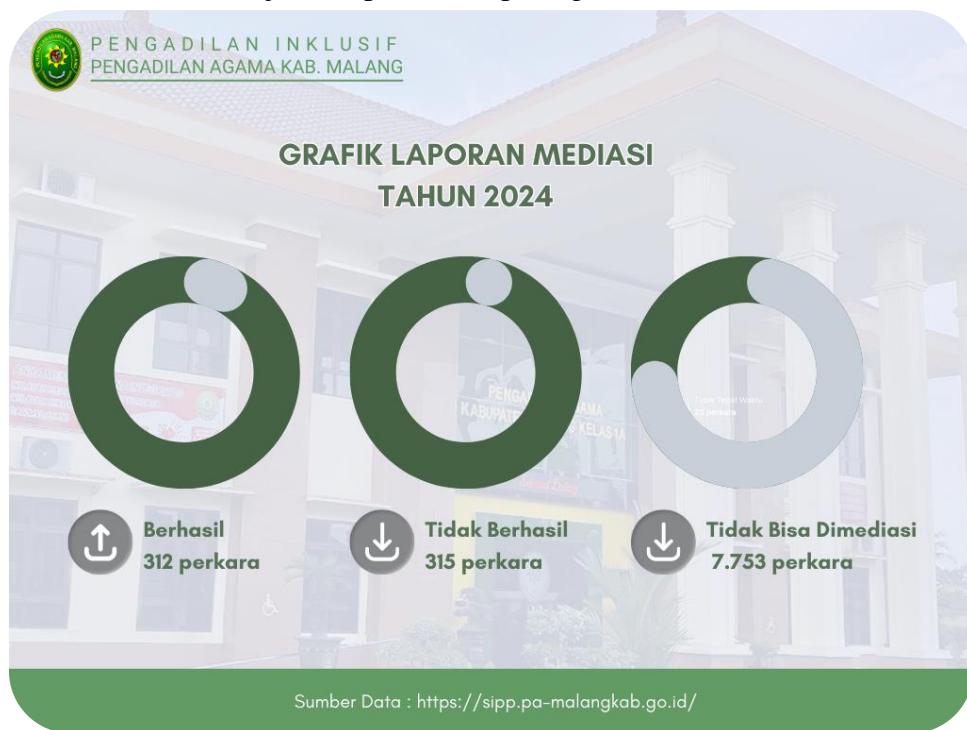
Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus 7.860 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) perkara dan dari jumlah perkara putus tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2023 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 3 (tiga) perkara dan pada tahun 2024 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 30 (tiga puluh) perkara dan 3 (tiga) perkara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum banding 7.830 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) perkara atau 99,6% (sembilan puluh sembilan koma enam persen), sehingga dari 30 (tiga puluh) perkara yang mengajukan banding tersebut, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 (sembilan) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 21 perkara

70% (tujuh puluh persen), kemudian dari jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 9 (sembilan) perkara tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 9 (sembilan) perkara 100% (seratus persen) Sebagaimana (*Lampiran 5, 6 dan 7*).

- **Jumlah Perkara yang berhasil di mediasi**

Dari jumlah sisa perkara tahun 2023 sebanyak 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) perkara ditambah dengan penerimaan perkara pada tahun 2024 sebanyak 7.986 (tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) perkara, jumlah perkara yang melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) perkara atau 7,48% (tujuh koma empat puluh delapan persen) dan yang berhasil dimediasi sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) perkara atau 49,76% (empat puluh Sembilan koma tujuh enam persen), sedangkan perkara yang gagal dimediasi dan tidak layak mediasi sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) perkara atau 50,24% (lima puluh koma dua puluh empat persen), perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 7.753 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga) perkara 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) sebagaimana (*Lampiran 8*).

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

- POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam membuat surat gugatan atau permohonan tersebut para pihak tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor 0130-KPA.W13-A35/MOU/PL.1.1.5/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 untuk pelaksanaan Anggaran Posbakum DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terserap sebesar Rp99.974.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk 1.628 (seribu enam ratus dua puluh delapan) jam layanan dan 5.300 (lima ribu tiga ratus) pemohon bantuan hukum sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 8071/SEK.W13-A35/PL1.1.5/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Lembaga bantuan hukum ini sesuai perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti surat permohonan dan gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.
- c. Penyediaan infomasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

- d. Bantuan sebagai pendamping atau kuasa khusus bagi salah satu pihak pencari keadilan dalam beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jam Layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah pada jam kerja yaitu pada hari Senin s.d Jum'at, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB atau sampai Pemohon bantuan hukum pada hari itu terlayani semua meskipun jam pelayanan Posbakum sudah selesai.

Jika ditilik dari jam layanan, maka Layanan Posbakum ini telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan yakni 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) jam layanan dengan hasil dilapangan sebesar 1.628 (seribu enam ratus dua puluh delapan) jam atau lebih 277 jam dengan jumlah perkara sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) perkara. Hal ini karena telah adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan LKPH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu yang beracara di Pengadilan agar tetap melayani pemberian bantuan hukum/advis kepada para pihak hingga masa perjanjian berakhir.

Rekapitulasi jumlah layanan Posbakum selama tahun 2024 dapat dilihat pada (**Lampiran 9**) dengan grafik tertampil di bawah ini :



Sumber Data : <http://kinsatker.badilag.net/>

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan anggaran dalam DIPA 2024 untuk pelaksanaan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari kantor Pengadilan sehingga keberadaan Sidang Keliling tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) atau 100 (seratus persen)%.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Jumlah Perkara Prodeo DIPA yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 mendapatkan anggaran dari DIPA Dirjen Badilag sebesar Rp30.858.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Jumlah perkara prodeo DIPA sejumlah 60 (enam puluh) perkara dan kesemuanya telah diselesaikan dengan baik dengan menyisakan anggaran Rp30.858.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau 100 (seratus persen)%.

Rekapitulasi Sidang Keliling dan Prodeo selama tahun 2024 dapat dilihat pada grafik tertampil di bawah ini :





BAB III

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem yang baik yang telah tercipta pada sebuah organisasi tidak akan berjalan baik apabila sumber daya manusianya tidak peduli dengan organisasi itu sendiri. Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada sebuah organisasi manapun amatlah penting dan menentukan, karena setiap SDM merupakan roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh organisasi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna, produktif dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda organisasi dimaksud. Oleh karena itu membina dan mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing menjadi sebuah keharusan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI selain mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah mengambil langkah konkret yakni :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan Diklat dan/atau pelatihan yang diadakan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung RI terhadap SDM baik Teknis maupun Non Teknis;
- c. Mengadakan rapat dinas secara berkala dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan rapat dinas struktural secara berkala demi peningkatan mutu Pengadilan;
- e. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai untuk memutuskan memberikan promosi dan mutasi.
- h. Memberikan standar yang jelas dalam penyelesaian tugas-tugas di bidang organisasi dan tata laksana tak terkecuali mengenai pensiun pegawai/Hakim sehingga tercipta kepastian hukum bagi yang bersangkutan.

Adapun secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 berjumlah 51 (lima puluh satu) pegawai terdiri dari Hakim dan ASN serta dibantu oleh 22 (dua puluh) PPNPN yang digaji oleh DIPA tahun anggaran 2024 seperti dijabarkan pada **Lampiran 10** (Statistik PNS) dan **Lampiran 11** (Statistik Tenaga PPNPN).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal rekrutmen tidak mempunyai kewenangan, karena dalam hal ini rekrutmen menjadi wewenang / hak Mahkamah Agung RI.

1. Mutasi

Pada tahun 2024 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 6 (enam) pegawai, dan telah terealisasi 6 (enam) orang sebagaimana dalam **Lampiran 12**.
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 30 (tiga puluh) orang hakim dan pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana dalam **Lampiran 13**.
- c. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) hakim dan 3 (tiga) orang pegawai mutasi masuk sebagaimana dalam **Lampiran 14** dan terdapat 6 (enam) hakim dan 3 (tiga) orang pegawai mutasi keluar sebagaimana dalam **Lampiran 15**.
- d. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2024 Hakim dan Pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 52 orang, sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 16**.

2. Promosi

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 6 (enam) orang dari hakim dan pegawai promosi jabatan dalam **Lampiran 17**.

3. Pensiun

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 1 (satu) orang pegawai yang pensiun dan sudah turun SK pensiunnya yaitu an. Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H. sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 18**.

4. Diklat

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Upaya peningkatan SDM Teknis Yudisial sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena baik Hakim dan Panitera merupakan tolak ukur dalam terselenggaranya penegakan hukum dan terwujudnya rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Dengan demikian, profesionalitas aparatur Teknis Yudisial menjadi keniscayaan. Peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan nurani (*morals*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) aparat pengadilan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur serta pengalaman kerja melalui mutasi terencana (baca : **Lampiran 19 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial**).

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2024 mengenai Tunjangan Pejabat Negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di bawahnya, maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung pada umumnya, dan Pengadilan Agama khususnya lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan wajah Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun SDM Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

terdiri dari Hakim sebanyak 12 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 10 hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 10 orang, sedang Jurusita sebanyak 1 orang dan Jurusita Pengganti sebanyak 1 orang. (sebagaimana diuraikan dalam *Lampiran 20*). Adapun staf yang membantu administrasi di Kepaniteraan yaitu pegawai dengan jabatan Pengelola Penanganan Perkara sebanyak 2 orang, CPNS sebanyak 3 orang dan 13 orang PPNPN.

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial di sini adalah aparatur peradilan yang mengelola bidang organisasi dan tata laksana serta administrasi umum, sering di istilahkan dengan sebutan Sekretariat, dimana lingkup Sekretariat ini lebih luas dan bersifat umum. Sekretariat memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya *ke dalam* (mengenai tata kelola kepegawaian, keuangan atau gaji pegawai dan pengelolaan sarana prasarana untuk pegawai) dan juga *keluar* yang menyangkut pelayanan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kebersihan kantor.

Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan serta Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian. (baca: *Lampiran 21 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial*)

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari Sekretaris, Kepala Subbag. Umum dan Keuangan, Kepala Subbag Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masing-masing sebanyak 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang merangkap Panitera Pengganti, dan Bendahara

Penerimaan / PNBP merangkap Panitera Pengganti 1 (satu) orang dan staf Umum dan Keuangan sebanyak 4 orang (2 dari PNS, 1 dari PPPK dan 1 dari PPNPN) termasuk petugas keamanan dan cleaning service, sedang Pegawai dari Kepegawaian dan Ortala terdiri dari 1 Analis SDM Aparatur dan 1 orang PPNPN sedangkan dari Perencanaan, IT dan Pelaporan sebanyak 3 orang pegawai terdiri dari 1 orang Pranata Komputer ahli Pertama dan 1 orang Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan 1 orang PPNPN (baca: **Lampiran 22 tenaga non teknis**).

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (Panitera dan Jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.



BAB IV

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, penerapan kaidah-kaidah yang baik antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan
- mandiri.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

pelaksana teknis serta secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Pejabat Penandatangan SPM / Pengaji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, serta dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dan beberapa operator. Semua Pejabat Pengelola Keuangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan SEKMA Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

- 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)**

Pengelolaan Keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan badan pada akun standart, namun yang digunakan dalam DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.604730/2024 tanggal 28 November 2023 ada 3 tiga jenis belanja yakni :

- a. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang termasuk kelompok belanja pegawai adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

- Pagu Anggaran**

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 7.040.181.000,- (tujuh miliar empat puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 7.013.382.204,- (tujuh milyar tiga belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar 99.62% .

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran tersebut belanja pegawai sisa sebesar Rp. 26.798.796,- (dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah) Matrik terlampir pada (*Lampiran 24*).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada Pengadilan terdiri dari belanja barang Operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

- **Pagu Anggaran**

Pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk belanja barang Operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun 2024 mendapatkan pagu sebesar Rp. 2.563.224.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk belanja operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

- **Realisasi Anggaran**

Belanja Barang Operasional telah terealisasi sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar 2.562.926.518,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan presentase 99.99% Matrik terlampir pada (*Lampiran 25*).

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima untuk belanja barang

operasional ada sisa dana sebesar Rp. 297.482,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan untuk belanja barang non operasional berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi masih ada sisa dana sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) sisa anggaran tersebut ada pada kebutuhan sehari –hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan konsultasi.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan maksimal kapitalisasi aset tetap atau aset yang ditetapkan pemerintah.

- **Pagu Anggaran**

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama memperoleh belanja modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa Pembuatan Toilet Disabilitas dan Backdrop.

Realisasi Anggaran

Realisasi sebesar Rp. 99.901.123,- (sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) untuk Pembuatan Toilet Disabilitas dan Backdrop.

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan realisasi anggaran belanja modal berupa Pembuatan Toilet Disabilitas terdapat sisa sebesar Rp. 93.277,- (Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 99.81 %. dan realisasi anggaran belanja modal berupa Backdrop terdapat sisa sebesar Rp. 5.600,- (lima ribu enam ratus rupiah) atau 99.99 %. Matrik terlampir pada (**Lampiran 26**).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2024 sebesar Rp. 16.357.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk Dipa 01. Matrik terlampir pada (**Lampiran 27**).

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama (Badilag)

Dipa ini berasal Badan Peradilan Agama (Dipa 04) dengan Nomor : DIPA-005.04.2.604731/2024 tanggal 24 November 2023, membagi 3 jenis pelaksanaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu Anggaran

Pagu sebesar Rp. 185.858.000,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :

- 1). Sidang Diluar Gedung Pengadilan;
- 2). Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM);
- 3). Pembebasan Biaya Perkara.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu sebesar Rp. 185.858.000,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah terserap / terealisasi sebesar 185.832.000,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,99 % sehingga semua belanja barang terserap dengan baik.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan realisasi belanja barang hanya terdapat sisa sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) Matrik terlampir pada (*Lampiran 28*).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2024 sebesar Rp. 715.574.500,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk Dipa 04. Matrik terlampir pada (*Lampiran 29*).

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagaimana besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan SIMAN V.2 yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang .
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 2 KIB, yakni KIB Bangunan gedung kantor lama yang sekarang telah di alih fungsikan sebagai Gedung Arsip, dan KIB Bangunan gedung kantor baru yang telah ditempati serta 2 KIB tanah negara.
- Melaksanakan revaluasi terhadap bangunan gedung dan tanah, dan telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

Gedung lama :

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lama, terletak di Jl. Panji No.202 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang, dibangun di atas tanah seluas 4.000 (empat ribu) M², di mana luas tanah untuk bangunan 845 (delapan ratus lima puluh lima) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ruangan termasuk didalamnya 3 (tiga) ruang sidang dan sekarang dialifungsikan pemanfaatannya menjadi Gedung Arsip sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi nomor: 209/BUA/SK/10/2017.

Gedung baru :

Gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang baru, terletak di Jl. Raya Mojosari Kepanjen Kabupaten Malang, luas tanah seluas 6.423 (enam ribu empat ratus dua puluh tiga) M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.800 (seribu delapan ratus) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ruangan termasuk didalamnya 1 (satu) ruang sidang utama dan 3 (tiga) ruang sidang biasa.

a. Pengadaan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan belanja Modal penambahan nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa pembuatan toilet disabilitas dan Backdrop. Pagu Belanja Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan terealisasi Rp. 99.901.123 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus satu ribu

seratus dua puluh tiga rupiah) atau sebesar (99.75%).

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Pagu Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp. 488.680.000 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 488.665.154 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar (100%), Hal ini digunakan untuk pengecatan gedung dan perbaikan-perbaikan lainnya / termasuk kamar mandi.

c. Penghapusan

Dalam Tahun anggaran 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terdapat pengajuan penghapusan tanah, gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan Semester II Tahun 2024 ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2024, dan juga telah di laporkan ke kantor

Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.

- Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak 25 (dua puluh lima) ruangan.
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor roda dua (2) sebanyak 9 (sembilan) unit dan untuk kendaraan roda empat (4) sebanyak 7 (tujuh) unit.
- Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.

Adapun barang jenis barang inventaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Matrik terlampir pada **Lampiran 30**.

Di samping pengelolaan inventaris berupa Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin juga terdapat pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi :

Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi :

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuh stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuh stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar.
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempatkannya pada setiap buku baru.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak pepustakaan serta di masukkan pada aplikasi SLIMS (*Senayan Library Management System*) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Melayani para peminjam buku.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana untuk Pengadaan Belanja Modal nilai Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 100.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar

99.901.123 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) (99.90%). sisa anggaran sebesar Rp. 98.877,- (Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

b. Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pada Tahun anggaran 2024 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 233.718.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) yaitu berupa :

- Kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp. 11.125.000,- (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- BBM Mobil Sewa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
- Server sebesar Rp. 1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Perawatan PC sebesar Rp. 28.249.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan rupiah)
- Perawatan Laptop/Notebook sebesar Rp. 9.256.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Perawatan Printer sebesar Rp. 13.412.000,- (tiga belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah)
- Genset sebesar Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- AC Split sebesar Rp. 13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pemeliharaan Inventaris Kantor sebesar Rp. 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Kendaraan Bermotor Roda 4 sebesar Rp. 119.250.250,- (seratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp.

233.559.750 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (99,93)% sisa anggaran sebesar Rp. 158.250,- (seratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

c. Penghapusan

Pada Tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mengajukan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung karena belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana yang berupa meubelair, ada beberapa meja dan kursi yang kurang layak namun masih tetap dipergunakan.

d. Kegiatan Administrasi Umum pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengelolaan kegiatan Urusan Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi pengurusan surat menyurat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1). Pengurusan surat-menyurat.

- a) Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) pucuk surat terdiri dari
 - Surat dari Pengadilan Agama Se Indonesia.
 - Surat dari Mahkamah Agung RI.
 - Surat dari Badan Peradilan Agama.
 - Surat dari perorangan dan instansi lain.

Surat-surat tersebut meliputi :

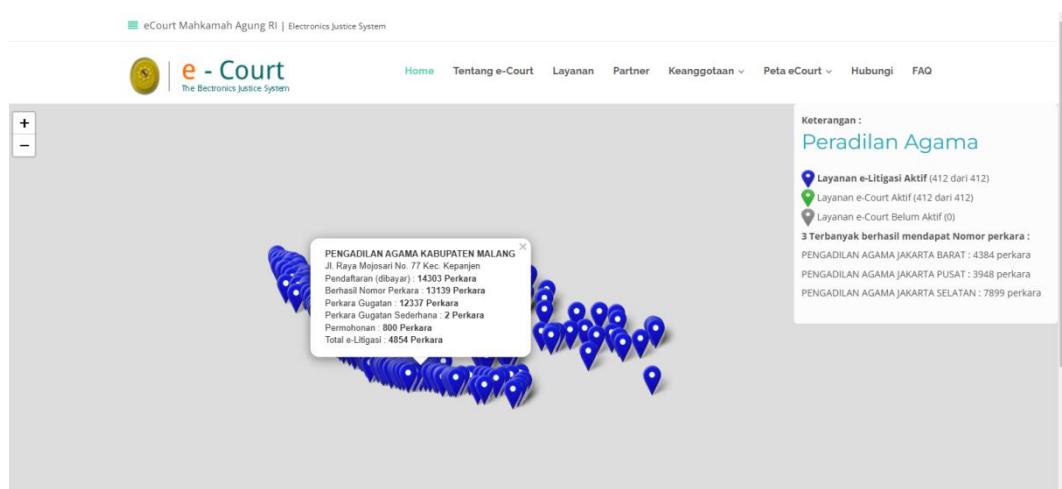
- OT (Organisasi dan Tata Laksana) sebanyak 9 (sembilan) pucuk surat
- HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pucuk surat
- KP (Kepegawaian) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pucuk surat
- KU (Keuangan) sebanyak 6 (enam) pucuk surat
- PL (Perlengkapan) sebanyak 15 (lima belas) pucuk surat

- HK (Hukum) sebanyak 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) pucuk surat
 - PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 19 (Sembilan belas) pucuk surat
 - PB (Pembinaan) sebanyak 1 (satu) pucuk surat
 - OPS (Pengawasan) sebanyak 1 (satu) pucuk surat.
 - SK (Surat Keputusan) sebanyak 8 (delapan) pucuk surat
(Lampiran 31)
- b) Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) nomor surat, yang terdiri dari :
- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 17 (seratus empat) pucuk surat
 - HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 221 (delapan puluh enam) pucuk surat
 - KP (Kepergawaiian) sebanyak 121 (seribu seratus delapan puluh tujuh) pucuk surat
 - KU (Keuangan) sebanyak 259 (tiga ratus lima belas) pucuk surat
 - KS (Kesekretariatan) sebanyak 0 (lima) pucuk surat
 - PL (Perlengkapan) sebanyak 78 (enam puluh tiga) pucuk surat
 - HK (Hukum) sebanyak 5004 (enam ribu tiga ratus dua puluh empat) pucuk surat
 - PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 0 (sebelas) pucuk surat
 - KP (Kepergawaiian) sebanyak 438 (nol) pucuk surat
 - SK (Surat Keputusan) sebanyak 27 (dua belas) pucuk surat.
(Lampiran 32)

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- **IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Dasar hukum layanan *e-Court* adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan *e-Court* sejak Desember 2018 hingga sekarang. Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menangani perkara melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 2843 (dua ribu delapan ratus empat puluh tiga) perkara, Screenshot diambil pada tanggal 31-12-2024 pukul 16.33 WIB).



Pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung *e-Court* berupa sosialisasi informasi *e-Court* kepada masyarakat sebagai Pengguna terdaftar lainnya seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang kemudahan layanan *e-Court*.

Diperlukan adanya sosialisasi informasi *e-Court* karena dengan menggunakan *e-Court* banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya *e-Court* lebih murah

daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas Pengadilan menjadi terjaga.

Mereviu kembali tentang definisi *Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Administrasi Perkara secara Elektronik* adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan Peradilan. Sedangkan persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain (Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2019). Pengguna Terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana Advokat disumpah, sedangkan persyaratan untuk Pengguna Lain adalah :

- a. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
- c. Penetapan ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Faktanya, walaupun layanan administrasi perkara telah merata untuk semua kalangan, namun yang terbanyak dari pengajuan tersebut adalah Pengguna Terdaftar, sedangkan Pengguna Lain masih bisa dihitung dengan jari. Hal inilah yang mendasari Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat inovasi tentang tata cara pendaftaran Pengguna Lain tanpa harus pergi ke kantor Pengadilan yakni secara online dan bisa diakses dari mana saja dengan link yang telah disediakan (www.pa-malangkab.go.id/ecourt).

Hal ini tentu menjadi bukti keseriusan lembaga Peradilan dalam membangun era baru berbasis teknologi untuk melayani sebagai motto MA dalam Ulang Tahunnya yang ke 79 dengan tema "**Peradilan Tangguh Indonesia Maju**".

▪ **IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilaksanakan hingga saat ini. SIPP yang merupakan aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat yang dikembangkan secara terus-menerus oleh Mahkamah Agung RI untuk digunakan oleh lembaga Peradilan baik tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi secara nasional. Sistem ini dapat menjamin kevalidan struktur aplikasi dan data mengingat sinkronisasi database dilakukan secara *realtime* melalui internet. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim serta sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah

Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan

Agama lainnya yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi terbaru 5.6.4 yang merujuk pada Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana dinstruksikan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini dapat memperingan beban tugas kita.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak henti-hentinya meningkatkan dan mempertahankan kinerja SIPP hingga pada bulan Februari 2024, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan atas Peringkat Terbaik II Dalam Bidang Kinerja E-Court Tingkat Banding di Lingkungan PTA Surabaya Tahun 2023 berdasarkan nomor sertifikat 910/KPTA.W13-A/HM3.1.3/II/2024. Hal tersebut merupakan usaha dan upaya seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerja SIPP selama tahun 2024.



BAB V

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Salah satu dari 5 prioritas kerja Presiden adalah Reformasi Birokrasi, Presiden RI Joko Widodo meminta agar birokrasi di tanah air berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat. Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan ZI di PA. Kab. Malang diawali dengan dengan pencanangan tahun 2018 dan terus dilakukan upaya internalisasi nilai-nilai pembangunan zona integritas dengan merubah perilaku individu dari aparatur yang minta dilayani bertransformasi menjadi prilaku melayani akan melahirkan budaya kerja yang positif. Hal ini dimulai dari sikap keteladan pimpinan yang menjadi uswatun hasanah.

Apartur yg professional dan berintegritas akan menghasilkan pelayanan prima dan kinerja yg maksimal bagi satuan kerja. Untuk itu PA Kab.Malang selalu berusaha memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pelatihan, juga mengadakan DDTK dan *in house training* agar terwujud aparatur peradilan yg berjiwa *hospitality* dengan selalu menerapkan 5S.

Dengan SDM yang professional dan handal kami siap mewujudkan Zona Integritas dengan tekad membangun SDM yang bisa diandalkan untuk mengubah budaya kerja menuju lingkungan kerja yang bermartabat, konsisten dalam kedisiplinan maupun belajar serta memperbarui pola pikir dan perilaku yang semakin baik. Dengan menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pelayanan prima terwujud dari seluruh aparatur pengadilan di mulai dari security hingga seluruh staff pelayanan. Atas prestasi itu PA. Kab. Malang meraih predikat Pelayanan Prima dari

kemenPANRB.

Pada tahun 2024 terus dilakukan Pembangunan zona integritas, setelah 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan anugerah sebagai satuan kerja yang meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja tanggal 4 Desember 2023. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mendapatkan nilai total sejumlah 92,09 dan mendapatkan nilai tertinggi nomor 2 dari 60 Satuan Kerja. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan setelah sebelumnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang melewati berbagai tahapan dimulai dari seleksi administrasi, Desk Evaluation (analisis dokumen dan wawancara), validasi dan pengolahan survey, evaluasi lapangan hingga panel final dan



clearance.

Pada tahun 2024 ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertekad untuk mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah untuk terus bekerja dengan integritas. Tahun ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang siap menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGERTIAN:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi Peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

TUJUAN

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan.
- c. Menjaga independensi dan imparsial aparatur Pengadilan.

PRINSIP

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Integrasi;
- b. Koordinasi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;
- e. Aksesibilitas;
- f. Transparansi; dan
- g. Akuntabilitas;

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada era modernisasi saat ini, lembaga Peradilan perlu mendapat dukungan teknologi informasi yang mumpuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga didapatkan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk menunjang prasyarat tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang trampil, baik dalam pengoperasian alat (*tools*) perangkat lunak-software maupun perangkat keras-hardware setelah kebutuhan prasarana tercukupi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyiapkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi pelayanan publik yang menunjang pelayanan publik secara umum, dan para pihak yang berperkara secara khusus serta mampu mempercepat pekerjaan dari aparatur Pengadilan. Dalam menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbenah diri dengan terus melakukan inovasi dan tidak terhenti namun tetap berkarya dan memberikan sumbangsih kepada dunia Peradilan, dimana dalam kurun waktu tersebut telah memiliki beberapa aplikasi andalan yang dipergunakan untuk area pelayanan publik yakni :

1. *Aplikasi Maskarebet* (Mengantri Sidang Tanpa Ribet), sebuah aplikasi yang berbasis web server dan tersedia pada website resmi, dengan mengambil dari database SIPP versi terbaru untuk memberikan

informasi mengenai Jadwal Sidang kepada para pihak berperkara sekaligus dengan estimasi waktu pukul berapa akan disidangkan. Dengan aplikasi ini, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi mengantri dan berjubel untuk mendapatkan nomor antrian karena penentuan antrian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang menyidangkan untuk kemudian ditayangkan dalam website resmi Pengadilan selang 3 hari sebelum sidang. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat informasi kepada para pihak berperkara dan akan hadir mengikuti persidangannya pada jam yang telah ditentukan.

2. *Aplikasi Info Perkara SMS gateway*, yang dimaksud di sini adalah informasi mengenai keseluruhan perkara dari yang bersangkutan melalui sms, dengan mengetik perintah tertentu maka didapat hasil yang diinginkan. Aplikasi ini juga singkron dengan Maskarebet dalam hal penyampaian informasi sidang kepada para pihak yang berperkara sehingga mampu mempermudah para pihak berperkara untuk menentukan kapan akan datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bersidang untuk perkaranya.
3. *Aplikasi SIAGA (System Informasi Auto Replay*, merupakan inovasi aplikasi untuk mengirimkan informasi jadwal sidang, akta cerai dan keuangan perkara melalui pesan whatsapp kepada para pihak berperkara ke nomor whatsapp yang terdaftar pada saat pendaftaran.
4. *Aplikasi Mesin Antrian PTSP*, yang menggunakan kiosK juga dengan layar Sentuh (*Touchscreen*), di dalamnya terdapat menu untuk mengentry nomor perkara, atau pilihan penggunaan layanan yang akan dituju, sehingga dengan demikian bisa tercetak nomor antrian layanan sesuai antriannya. Aplikasi ini membuat pelayanan menjadi lebih tertib dan antrian tidak menumpuk sehingga memudahkan proses berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
5. *Aplikasi Media Informasi Antrian Persidangan dan PTSP*, aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu media mengenai kapan akan dipanggil sesuai antriannya, berapa nomor antrian yang telah dipanggil dan dengan menggunakan layar datar TV secara khusus mampu

menjembatani sisi hiburan dalam batas waktu tunggu bagi para pihak berperkara dengan menyediakan informasi televisi nasional.

6. **Telescop**, singkatan dari Telusuri Surat Cerai Ori atau Palsu, yakni aplikasi berbasis web yang tersedia di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengecek apakah Akta Cerai telah terbit atau belum, berikut memberikan informasi mengenai keabsahan dan keaslian Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini tentu sangat berguna bagi para pihak berperkara dan juga pihak terkait seperti pihak KUA (Kantor Urusan Agama) ataupun bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai dan akan menikah lagi.
7. **AREMA PLUS card**, merupakan terobosan baru bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pihak berperkara, agar lebih tertib dan mudah dalam mengakses ruang pelayanan sekaligus merupakan pintu lapis keamanan pertama PA Kab. Malang bagi para pihak berperkara yang akan memasuki ruang tunggu. Inovasi bernama **AREMA PLUS card**, dengan pintu masuk secara elektrik (*gate system*) mempunyai cara kerja sederhana dengan terlebih dahulu melakukan registrasi **AREMA PLUS card** untuk kemudian diberikan kepada para pihak berperkara pada saat pendaftaran perkara. Setelah proses registrasi kartu oleh petugas PTSP, maka para pihak dapat memasuki ruang tunggu melalui pintu elektrik dengan mendekatkan/tap **AREMA PLUS card** pada gate sytem, dan karena Server telah mengenali dan merespon kartu tersebut secara realtime, maka palang pintu akan terbuka secara otomatis dan bila kartu tidak terdaftar, maka palang pintu elektrik tidak akan terbuka. **AREMA PLUS card** juga mempunyai keunggulan lain seperti dapat melakukan tapping (tempel) pada mesin antrian sehingga secara otomatis akan tercetak nomor antrian dan disisi lain, **AREMA PLUS card** juga dapat digunakan untuk memantau informasi perkara serta layanan lainnya menggunakan aplikasi **AREMA PLUS mobile** yang login akunnya hanya dengan memindai qrcode pada **AREMA PLUS card** tersebut

sehingga sangat mudah untuk digunakan para pihak berperkara mengingat **AREMA PLUS card** telah tersambung dengan database perkara SIPP.

8. **AREMA PLUS Mobile**, merupakan inovasi aplikasi layanan dengan berbasis aplikasi android. Aplikasi ini memiliki fitur yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Pengadilan Agama Kab. Malang seperti jadwal sidang, keuangan perkara, live chat dll. Aplikasi ini memudahkan pihak berperkara dalam mengakses informasi persidangan melalui smartphone.
9. **Buku Tamu Elektronik**, merupakan sebuah aplikasi Buku Tamu Digital untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan **tamu** maupun pengunjung yang datang, dengan cara memindai wajah tamu ataupun pengunjung pada kamera yang terpasang di meja resepsionis Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Setelah data tersimpan, tamu atau pengujung mendapatkan **kartu tamu unik** bersistem RFID sehingga tidak akan tertukar dengan tamu atau pengujung lain.
10. **Drive-Thru**, merupakan inovasi layanan Pengambilan Produk Pengadilan secara Drive-Thru yang dikembangkan oleh Tim IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai sarana pengambilan produk pengadilan (Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan), Para pihak dapat menentukan tanggal dan jam pengambilan produk (Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan) Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui website dan datang pada waktu yang telah dipilih tanpa harus mengantri terlebih dahulu.
11. **Pojok Konseling**, Pojok Konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan inovasi yang dilatar belakangi oleh kepedulian Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kesehatan mental masyarakat pencari keadilan khususnya bagi penyandang disabilitas dan pemohon Dispensasi Kawin (DK). Hasil dari kegiatan konseling ini berupa catatan konseling yang kemudian akan menjadi dasar

psikolog untuk memberikan surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut kemudian akan dimasukkan pada berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Hal ini tercantum dalam pasal 15 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog.

12. **Pengoptimalan Fasilitas Ruang Laktasi,** Pelayanan terhadap Ibu hamil dan Ibu menyusui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerlukan perlakuan khusus yang harus disediakan terutama Ruang laktasi yang mana sangat dibutuhkan oleh Ibu hamil dan Ibu menyusui yang termasuk dalam kelompok rentan.

- Pemberian Wallpaper di sebagian dinding Ruang Laktasi
- Penggantian cover meja agar lebih menarik
- Penataan ruang laktasi terbaru
- Pemberian mainan anak anak yang edukatif
- Pemberian poster edukatif bagi ibu menyusui
- Pemberian lemari pendingin untuk penyimpanan ASIP

13. **Pojok Informasi Bagi Perempuan,** Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian. Untuk mendukung program Pengadilan Agama Kabupaten Malang ingin mengoptimalkan dengan cara membuat Pojok Informasi bagi Perempuan yang berisikan informasi mengenai Hak-hak perempuan dan anak diantaranya :

1. Formulir pengajuan gugat cerai yang mencantumkan permintaan nafkah
2. Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
3. Hak-hak perempuan pada Pengadilan Agama
4. Hak-hak perempuan dan anak setelah terjadi perceraian

5. Cara memperoleh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

6. Brosur pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

Pihak yang diharapkan mendukung Hak-hak Perempuan dan Anak

- Perempuan sebagai pemilik hak
- Laki-laki sebagai kepala keluarga
- Hakim dengan memberikan putusan yang adil
- Advokat dengan memberikan bantuan hukum
- Pegawai pengadilan yang bisa memberikan informasi dan pelayanan

14. **Parkir Mandiri**, Inovasi Parman atau Parkir Mandiri merupakan inovasi bertujuan untuk meminimalisir gratifikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Para pengunjung atau pihak yang berperkara memarkirkan kendaraannya secara mandiri di halaman parkir yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan terpisah dari parkir pegawai. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memfasilitasi garis parkir agar parkir pengunjung tertata dengan baik, parkir yang teduh baik dari atap maupun pohon yang rindang serta gate parkir untuk menertibkan kendaraan yang keluar masuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta untuk keamanan kendaraan.

15. **Layanan Informasi Digital**, Layanan Informasi Digital adalah aplikasi yang disediakan di ruang tunggu pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara dalam mengakses informasi dengan mudah. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengecek apakah Akta Cerai sudah jadi atau belum, mengecek panjar biaya perkara, melihat persyaratan berperkara di PA Kab. Malang dan melihat jadwal sidang.

16. **Inovasi SIGAPP**, “Sistem Informasi Gangguan Pada Pelayanan” atau disingkat dengan “SiGaPP” merupakan sebuah inovasi aplikasi berbasis web yang berguna untuk merubah cara pengaduan atas gangguan pelayanan yang ada dari cara manual atau kebiasaan lama

menjadi cara elektronik yang terintegrasi.

17. **Pojok JALIBAR**, Pojok JALIBAR (Jalur Layanan Isi Angin Ban dan Air) merupakan Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai sarana untuk mengisi angin ban kendaraan dan mengisi air radiator secara gratis. Para pihak mengisi angin ban kendaraan dan mengisi air radiator secara mandiri ataupun dibantu oleh Satpam yang berjaga.
18. **Inovasi SILAW**, Inovasi Silaw (Sistem Layanan Informasi berbasis WhatsApp AutoReply) yakni Inovasi yang layanan informasi melalui WhatsApp Auto Reply yang dapat digunakan oleh Para Pihak berperkara dalam mengetahui informasi perkara.

Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga mengembangkan inovasi khusus bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan bukti komitmen Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Pengadilan Inklusif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Inovasi tersebut diantaranya adalah:

1. **Layanan Khusus Disabilitas**, merupakan sebuah inovasi yang berupa fasilitas bagi pengandang disabilitas untuk mempermudah akses terutama di PA Kab Malang sehingga penyandang disabilitas dapat diperlakukan sama seperti lainnya. Fasilitas tersebut berupa halte disabilitas, jalur khusus disabilitas, toilet disabilitas, loket disabilitas, buku braile dan beberapa alat bantu seperti tongkat, kursi roda, dan alat bantu dengar.
2. **Aplikasi Sistem Audio To Text Recording (ATR)** adalah aplikasi untuk merubah suara menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi *google speech API (Application Programming Interface)* dengan fitur *translation*-nya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks dan audio. Aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan SIPP 5.6.3. ATR yang ada di PA Kab. Malang terus mengalami pengembangan

dan terakhir AVTR v.1 (Audio Video Teks *recording*) dimana kesemuanya akan secara otomatis terekam dalam bentuk video, audio dan teks secara simultan dan realtime dengan format *.webm yang mempunyai ukuran file lebih kecil dan tidak menghabiskan media penyimpanan. Aplikasi tersebut sangat berguna untuk penyandang disabilitas rungu mempermudah penyandang disabilitas rungu dalam mengikuti persidangan, karena percakapan selama persidangan terkonversi secara otomatis menjadi teks dan dapat terbaca pada layar komputer yang ada didepan para pihak, juga TV media yang ada di ruang sidang

3. **Automatic Door Sensor Disabilitas (ADSD)**, merupakan sebuah inovasi yang berupa Kartu Prioritas Arema Gold yang diberikan kepada penyandang disabilitas sehingga dapat mengakses ke semua ruang pelayanan secara mandiri, dengan alat sensor dan terkoneksi dengan kartu yg dibawanya maka penyandang disabilitas khususnya tuna netra akan mengetahui keberadaannya di ruang pelayanan/ruang sidang.
4. **Deteksi Dini**, sebagai upaya peningkatan layanan inklusif bagi para penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki Deteksi Dini Penyandang Disabilitas. Deteksi dini dilakukan dengan pengisian formulir penilaian personal penyandang disabilitas yang diisi pada saat pendaftaran. Sehingga dengan adanya deteksi dini ini, penyandang disabilitas dapat dipetakan dan diidentifikasi termasuk kategori penyandang disabilitas apa serta fasilitas apa saja yang dibutuhkan berdasarkan jenis disabilitas tersebut.
5. **Brosur Informasi Berperkara Braile & Papan Penunjuk Arah Braille**, brosur informasi berperkara dalam huruf braille ini disediakan dalam rangka mempermudah akses layanan informasi berperkara khususnya persyaratan pengajuan perkara bagi penyandang disabilitas tuna netra di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Papan penanda arah dan papan penanda ruangan braille juga memudahkan pengunjung Pengadilan Agama Kabupaten Malang penyandang

disabilitas tuna netra untuk mengetahui arah dan ruangan mana yang harus dituju.

6. ***Optimalisasi Antrian Pelayanan Perkara***, memberikan tanda kepada para pencari keadilan pada kelompok rentan untuk memudahkan petugas memberikan pelayanan prioritas secara tepat sasaran.
7. ***Brosur Audio Terintegrasi QR CODE bagi Kelompok Tuna Netra***, Brosur audio terintegrasi QR CODE ini merupakan brosur yang dibuat untuk mempermudah para pihak dari kelompok Tuna Netra untuk mengakses persyaratan pendaftaran perkara yang hendak didaftarkan.
8. ***Digitalisasi Peminjaman Fasilitas Alat Bantu Disabilitas***, memberikan kemudahan melalui digitalisasi kepada para pencari keadilan pada kelompok rentan dalam meminjam alat yang dibutuhkan.



BAB VI

BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Mahkamah Agung selaku pengendali kebijakan bagi segenap aparatur Pengadilan di seluruh Lembaga Peradilan dibawahnya selalu menekankan kedisiplinan dan meningkatkan pengawasan intern secara ketat dan transparan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memasukkan pengawasan sebagai salah satu program utama dalam Blueprint Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal. Agar pengawasan berjalan efesien dan efektif Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Pengawasan dan Pembinaan yang dikemas dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/ 080/ SK / VIII / 2006 Tanggal : 24 Agustus 2006, yang lebih dikenal dengan Buku IV.

Dalam rangka penyempurnaan pedoman pengawasan, sekaligus peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan, Mahkamah Agung mengeluarkan paket regulasi yang terdiri dari 3 Perma, yakni Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu instrument manajemen yang harus

dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan.

Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah memasuki era digital industri 4.0, dimana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem manajemen dari manual ke elektronik (e-Governance), maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama meluncurkan inovasi berupa aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-BINWAS). Aplikasi ini mengakomodir pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan setiap waktu dan setiap saat oleh atasan langsung terhadap bawahan secara preventif dan represif sesuai Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan PERMA Nomor 8 Tahun 2016.

Aplikasi E-BINWAS hadir sebagai alat bantu bagi pimpinan pengadilan, hakim tinggi pengawas daerah dan hakim pengawas bidang dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan. Pembinaan dan pengawasan pada aplikasi E-BINWAS mencakup manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi umum, serta kinerja pelayanan publik. Pembinaan dilakukan oleh hakim tinggi sebagai mentor terhadap hakim tingkat pertama sebagai mentee minimal satu kali dalam satu bulan dengan mempertimbangkan beban tugas masing-masing dalam penyelesaian perkara dan tugas pembinaan dan pengawasan di wilayah hukum masing-masing.

Aplikasi E-BINWAS mendukung efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dalam pembinaan reguler yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan tingkat pertama. Dengan fitur yang tersedia, aplikasi ini juga mendukung peningkatan kemampuan teknis yustisial, integritas pribadi, kredibilitas, dan profesionalisme hakim, yang menjadi tolak ukur dalam halaman 3 penentuan promosi dan mutasi hakim. Sehingga kehadiran aplikasi ini tidak untuk menambah beban tugas hakim melainkan sebaliknya dapat menjadi sarana pendukung dalam melaksanakan trilogi tugas pokok dan

fungsi hakim yaitu hakim sebagai pemeriksa perkara (tugas yudisial), hakim sebagai pembina dan pengawas (tugas struktural), dan hakim sebagai pemikir dan pelaku pembaharuan (tugas konseptual).

Sebagai salah satu upaya menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, arah kebijakan pengawasan dan pembinaan pada pengadilan tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan agama perlu diselaraskan dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku sedini mungkin. Implementasi aplikasi E-BINWAS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pembinaan serta mewujudkan kesatuan persepsi antara pengawas dan yang diawasi.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengaplikasikan E-BINWAS dalam pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang pada Triwulan III dan Priwulan IV tahun 2024 yang berjalan dengan baik dan lancar.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Yang dimaksud pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengawasan melekat dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada para hakim, penitera dan sekretaris. Selanjutnya panitera dan sekretaris melakukan pengawasan kepada aparat dibawahnya secara berjenjang dan terus-menerus terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari. Disamping itu pimpinan pengadilan mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sekurang-kurangnya satu

kali dalam satu bulan. Hal mana sesuai ketentuan Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah *pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan yang berlaku*.

Pengawasan fungsional dalam Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016). Terkait hal ini, maka pengawasan fungsional Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku atasan langsung dan Badan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** (disingkat APIP) di Lembaga Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya managemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan- kesalahan yang harus diperbaiki.

Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) selama tahun 2024 dilakukan setiap

semester, semester pertama bulan Januari sampai dengan Juni dan semester kedua bulan Juli sampai Desember . Pengawasan pada semester pertama dilakukan secara manual dan semua temuan sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali ke PTA Surabaya, sementara untuk semester kedua dilakukan melalui E-BINWAS dan sudah mencapai tahap akhir atau tuntas.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dimaksudkan dalam pengawasan rutin. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Pimpinan Pengadilan dan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk Hakim pengawas bidang yang betugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap triwulan dan hasilnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Wakil Ketua sebagai koordinator pengawan dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : Nomor SK: 5070/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/XI/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan surat tersebut telah dilaksanakan pengawasan bidang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2024 dan ditemukan beberapa temuan yang telah ditindaklanjuti dan dilaporkan pada Laporan Tindak Lanjut Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024. Bahkan laporan temuan dan tindak lanjut tersebut dipampang dalam website resmi Pengadilan guna mendapatkan perhatian dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Pada Triwulan III dan Triwulan IV pengawasan bidang oleh HAWASBID telah dilakukan melalui aplikasi E-BINWAS dengan hasil sebagai berikut:

Triwulan III, Tahun 2024

Nomor SK: 2441/KPA.W13-A35/SK/PWI.1/IV/2024
Tanggal SK: Selasa, 28 Mei 2024
Keterangan: Pengawasan Bidang Triwulan III tahun 2024
Tanggal Pelaksanaan: Senin, 01 Juli 2024
Tanggal Pelaksanaan Selesai: Senin, 30 September 2024
Tgl. Kontrak Kinerja:
• Mulai: Selasa, 08 Oktober 2024
• Selesai: Kamis, 31 Oktober 2024

Koordinator: H. A Zahri, S.H., M.H.I.
Pengisian: 1636 dari 1637 Pedoman
Hakim Pengawas Bidang:
• Manajemen Peradilan: Fahrurrozi (Hakim) (93/93)
• Administrasi Perkara: Muhammad Khairul (Hakim), Sutaji (Hakim) (672/672)
• Administrasi Persidangan: Shobirin (Hakim), Enik Firdaturrohmah (Hakim) (254/255)
• Administrasi Kesekretariatan: A. Bashori (Hakim), Abd. Rouf (Hakim) (359/359)
• Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik: Fahrurrozi (Hakim) (258/258)

Percentase: 99.94%
Proses: Berjalan

AKSI:
Edit Pengawasan, Hopus Pengawasan, Pedoman, Temuan, Kontak Kinerja, Validasi Pimpinan, Riwayat Pekerjaan

Gambar 1: Triwulan III

Triwulan IV, Tahun 2024

Nomor SK: 5070/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/XI/2024
Tanggal SK: Senin, 11 Nopember 2024
Keterangan: Triwulan IV
Tanggal Pelaksanaan: Rabu, 13 Nopember 2024
Tanggal Pelaksanaan Selesai: Selasa, 31 Desember 2024
Tgl. Kontrak Kinerja:
• Mulai: Selasa, 23 Desember 2024
• Selesai: Selasa, 31 Desember 2024

Koordinator: H. A Zahri, S.H., M.H.I.
Pengisian: 1637 dari 1637 Pedoman
Hakim Pengawas Bidang:
• Manajemen Peradilan: A. Bashori (Hakim), Enik Firdaturrohmah (Hakim) (93/93)
• Administrasi Perkara: Muhammad Khairul (Hakim), Wahib Latukau (Hakim) (672/672)
• Administrasi Persidangan: Abd. Rouf (Hakim), Muhammad Zainuri (Hakim) (255/255)
• Administrasi Kesekretariatan: Ah. Fudillio (Hakim), Shobirin (Hakim) (359/359)
• Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik: Ahmad Suyuti (Hakim), Munasik (Hakim) (258/258)

Percentase: 100.00%
Proses: Selesai

AKSI:
Edit Pengawasan, Hopus Pengawasan, Pedoman, Temuan, Kontak Kinerja, Validasi Pimpinan, Riwayat Pekerjaan

Gambar Triwulan IV

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.kab.malang@gmail.com serta melalui nomor ponsel pengaduan yang cepat dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai. Selain itu dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara langsung, Pengadilan Agama Kabupaten

Malang telah pula menempatkan petugasnya dalam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) guna penyelesaian yang cepat dan mudah.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint yang terkoneksi secara online melalui aplikasi dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan url : absensi.pta-surabaya.go.id maupun secara manual sehingga baik kedatangan maupun pulangnya pegawai bisa dilihat dari absensi online tersebut dan manual secara langsung dengan mencocokkan pada hasil print out fingerprint setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 serta Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

B. EVALUASI PENGAWASAN

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat dinas secara berkala kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna melakukan evaluasi kerja atas tugas dan tanggungjawab masing-masing mengingat salah satu kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik Hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Bahkan, hasil dari Rapat dinas secara berkala tersebut dapat diakses oleh publik di Laman resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai wujud

keterbukaan informasi.

2. Mengadakan assessment internal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya administrasi baik dibidang manajemen, kepaniteraan maupun kesekretariatan terkait dengan mutu pelayanan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh jajaran terkait atas hasil rapat pembinaan, rapat kerja nasional maupun rapat kerja daerah baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan, masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilakukan evaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melakukan monev atas hasil temuan Hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris serta jajarannya agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi akan dijadikan

- bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
- f. Surat Keputusan, struktur, temuan dan tindaklanjut tersebut dapat pula diakses oleh publik di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga mampu menciptakan iklim budaya kerja cepat, efisien dan efektif serta mampu beradaptasi pada perubahan.
 - 5. Mengadakan rapat koordinasi berupa *Coffee Morning* yang dilaksanakan setiap minggu yang diikuti oleh seluruh jajaran hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan PPNPN. Kegiatan *Coffee Morning* ini dilaksanakan untuk menjadi forum diskusi antara pimpinan dan aparatur PA Kab. Malang untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB VII

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2024 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara tahun 2023 sebanyak sejumlah 394 (tiga ratus Sembilan puluh empat) perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 7.986 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) perkara dengan total total perkara yang ditangani sejumlah 8.380 (delapan ribu tiga ratus delapan puluh) perkara dan telah berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan sebanyak 7.860 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh) perkara (93,79%) (Sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan persen), sisanya sebanyak (6,21%) (enam koma dua puluh satu persen).

Pada tahun 2024, perkara yang diterima mengalami **penurunan** sebanyak 195 (Seratus Sembilan puluh lima) perkara atau 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen) apabila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2023 yang diterima sebanyak 8.181 (delapan ribu seratus delapan puluh satu) perkara. Presentase penyelesaian perkara (minutasi) tersebut telah sama dengan data monitoring SIPP versi 5.6.4 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan *Realtime* rasio penanganan perkara SIPP sebesar 93,79%. Adapun sisa perkara yang masih 6,21% tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media massa dan pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil terlebih dahulu secara resmi dan patut.

2. Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) perkara dan telah diputus pada tahun 2024 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara

(96,67%). Selanjutnya perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) perkara. Kemudian terdapat 3 (tiga) perkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2024.

3. Target Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 telah terpenuhi dengan baik, dari target 100%, terealisasi sebesar 99,60% dan sisa 0,40% dengan perincian untuk Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,62%, Belanja Barang baik operasional maupun non operasional terealisasi sebesar 99,99% dan Belanja Modal terealisasi sebesar 99,99%, sedangkan DIPA 04 mampu terserap 99,99% sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana DIPA 04 di 3 (tiga) Area pelayanan publik yakni Sidang keliling, Pos Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo (biaya gratis).
4. Program prioritas pembaruan sebagaimana 8 area perubahan yang dicanangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai implementasi dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yakni 1. Manajemen Perubahan, 2. Deregulasi Kebijakan, 3. Penataan dan penguatan organisasi, 4. Penataan tatalaksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terus menerus dilakukan sesuai dengan SOP dengan sistem yang terencana dan komprehensip dan pula telah dikongkritkan sebagianya dengan program-program prioritas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 meliputi: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu (**one day publish**) ; 2). Manajemen SDM; 3). Pengawasan/Pengaduan; 4). Pengelolaan website; 5). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan 6). Implementasi Program Legislasi Nasional yakni "**Justice for all**" yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Pelayanan Hukum (Posbakum).
5. Pelaksanaan administrasi perkara menggunakan SIPP versi tebaru 5.6.4 untuk sistem Online untuk sistem penyimpanan data digital secara internal dan Upload Sinkronisasi Direktori Putusan secara online/eksternal;

6. Penatausahaan tugas di bidang Kesekretariatan telah memakai tools atau aplikasi yang secara umum dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. Sekretariat : KOMDANAS dan SIMARI;
 - b. Bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP, SIKEP ABS E-KINERJA dan SIPINTAR;
 - c. Bagian Umum dan Keuangan memakai sistem aplikasi GPP sedangkan berbasis web : SIMARI, SIMAN dan OMSPAN, SAKTI, E-SADEWA;
 - d. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan memakai sistem aplikasi SATUDJA online, SAKTI, E-MONEV, LPSE, SIRUP, KINSATKER, E-IPLANS, E-BIMA, SIMTALAK dan E-BINWAS.

Yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan aturan yang ditetapkan.

7. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya penambahan jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita karena sudah tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim dan seluruh pegawai perlu ditingkatkan guna mewujudkan Hakim dan pegawai yang professional, berwawasan luas, terampil dan bertanggungjawab.
3. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon untuk meninjau Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena masih membutuhkan anggaran belanja modal untuk rumah dinas dan sarana prasarana ruang Aula agar bisa digunakan sehingga pelaksanaan persidangan tidak terganggu.
4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon dapat

mengupayakan peningkatan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan meubelair, AC, laptop, PC dan printer untuk mendukung percepatan administrasi peradilan yang optimal.

5. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon dapat mengupayakan anggaran perawatan Gedung Arsip karena selama ini belum tercover di DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sudah kita usulkan di ABT melalui aplikasi E-iplans tetapi masih belum juga terealisasi untuk perawatan Gedung tersebut.

C. PENUTUP

Secara runtut dan sistematis, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024 adalah bentuk realisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 1 tahun berjalan dan hal ini adalah hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari jajaran Pimpinan, para Hakim, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya maksimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga didapat pula hasil maksimal dengan meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan tugas pokok telah menunjukkan arah perbaikan dari tahun sebelumnya sehingga menumbuhkan harapan baru akan tercapainya target realisasi tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan pada tahun depan dengan lebih sempurna, sistematis dan tertib administrasi.

Dengan sistematika laporan (*outline*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI, menjadikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tampil lebih sederhana dan lebih mudah dalam pembuatannya namun lengkap dan terperinci serta terarah pada program dan kegiatan serta capaian kinerja sehingga hal ini jelas sangat membantu dalam pembuatan Laporan

mengingat laporan inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Kami pun sadar tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak terkait sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sempurnanya laporan dimaksud.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian tetap memperoleh Rahmat, Taufiq, dan Hidayah dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.





LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Ijin poligami	A. Perkawinan																						Keterangan										
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Januari	0	0	0	1	0	223	752	3	2	0	0	0	0	15	0	0	0	7	0	24	0	105	3	0	3	0	0	0	0	16	0	1154		
2	Februari	0	0	0	1	0	127	366	2	2	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	37	0	31	2	0	1	0	0	0	0	7	1	603		
3	Maret	1	0	0	2	0	105	260	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	7	0	9	0	48	2	1	3	0	1	0	0	1	3	448		
4	April	2	0	0	0	0	98	299	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	30	2	0	1	0	0	0	0	1	0	442		
5	Mei	1	0	0	1	0	188	505	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	21	0	73	5	0	0	0	0	0	0	3	3	808		
6	Juni	0	0	0	1	0	120	352	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	6	0	52	0	71	3	0	2	0	1	0	0	6	1	627		
7	Juli	0	0	0	0	0	160	425	1	1	0	0	0	0	15	0	0	0	6	0	13	0	39	0	0	0	1	0	0	0	6	2	669		
8	Agustus	1	0	0	1	0	145	439	3	1	0	0	0	0	9	0	0	0	3	0	16	0	88	0	0	0	2	0	2	0	0	5	7	722	
9	September	0	0	0	1	0	150	401	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	0	18	0	121	1	0	4	0	0	0	0	8	6	722		
10	Oktober	1	0	0	0	0	147	400	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	19	0	100	2	1	2	0	0	0	0	4	4	694		
11	November	1	0	0	0	0	156	379	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	7	0	82	4	0	1	0	1	0	0	2	3	648		
12	Desember	1	0	0	1	0	95	263	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	6	0	59	2	2	1	0	0	0	0	2	4	449		
JUMLAH		8	0	0	9	0	1714	4841	14	10	0	0	0	0	105	0	0	0	64	0	223	0	847	26	4	21	0	5	0	0	61	34	7986		



Kepanjen, 31 Desember 2024
Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
NIP. 19750717.200003.1.001

**LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

A redacted circular stamp of the Pengadilan Agama Kab. Malang. The stamp contains the text "PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG" around the perimeter and "KEPUTUSAN" in the center. A large black arrow points from the top right towards the stamp. Below the stamp, the signature "Drs. H. Misbah, M.H.I" is written in blue ink, followed by the handwritten number "NIP. 19711002.199603.1.001".

Kepanjen, 31 Desember 2024
Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
NIP. 19750717.200003.1.001

SISA PERKARA MENURUT JENISNYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

Nomor	Jenis Perkara SATKER	Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	A. Perkawinan																															
		3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG	394	7986	8380	2	0	0	1	0	137	349	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	3	2	0	6	0	1	0	0	0	5	520
	JUMLAH	861	7986	8847	2	0	0	1	0	137	349	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	0	3	2	0	6	0	1	0	0	0	5	520



Kepanjen, 31 Desember 2024
Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
NIP. 19750717200003.1.001

**PERKARA PUTUS YANG BELUM DIMINUTASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

Nomor	Jenis Perkara SATKER	A. Perkawinan																																				Keterangan					
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38									
1	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kepanjen, 31 Desember 2024
Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
NIP. 19750717.200003.1.001

**PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat diterima	
1	5103/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	31/10/2023	14/11/2023	30/01/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2	5497/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	15/11/2023	29/11/2023	17/01/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan.
3	3614//Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	12/12/2023	12/12/2023	25/01/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4	4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	15/01/2024	29/01/2024	14/03/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
5	2834/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	22/01/2024	05/02/2024	19/03/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan.
6	6107/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	29/01/2024	05/02/2024	20/03/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
7	5320/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	31/01/2024	12/02/2024	30/05/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
8	5916/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	01/02/2024	13-02-224	26/03/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan.
9	5872/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	31/01/2024	13/02/2024	04/04/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan.

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat diterima	
10	6440/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	07/02/2024	16/02/2024	05/04/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
11	768/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	15/02/2024	19/02/2024	04/04/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
12	6158/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	07/02/2024	20/02/2024	04/04/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
13	6649/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	22/02/2024	05/03/2024	24/04/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
14	175/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	06/03/2024	18/03/2024	08/05/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
15	192/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	20/03/2024	28/03/2024	16/05/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan.
16	209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	20/03/2024	02/04/2024	30/05/2024		✓		Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
17	3905/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	20/03/2024	02/04/2024	22/05/2024		✓		Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
18	6695/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	04/04/2024	18/04/2024	12/06/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan.
19	858/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	24/04/2024	02/05/2024	13/06/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
20	1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	30/05/2024	11/06/2024	22/07/2024		✓		Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat diterima	
21	2017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	04/07/2024	12/07/2024	29/08/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
22	2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	11/07/2024	22/07/2024	29/08/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
23	2253/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	17/07/2024	26/07/2024	30/08/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
24	2973/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	24/07/2024	02/08/2024	10/09/2024		✓		Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
25	2468/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	12/08/2024	23/08/2024	08/10/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
26	2266/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	26/08/2024	28/08/2024	08/10/2024		✓		Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
27	1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	11/09/2024	18/09/2024	06/11/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
28	766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	12/09/2024	26/09/2024	06/11/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan perbaikan amar putusan
29	2870/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	02/10/2024	14/10/2024	22/11/2024	✓			Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat diterima	
30	2838/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	29/10/2024	12/11/2024					Perkara belum diputus PTA Surabaya
31	4964/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	05/11/2024	21/11/2024					Perkara belum diputus PTA Surabaya
32	4237/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	11/11/2024	22/11/2024					Perkara belum diputus PTA Surabaya
33	4786/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	09/12/2024	16/12/2024					Perkara belum diputus PTA Surabaya



Kepanjen, 31 Desember 2024
Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
NIP. 19750717.200003.1.001

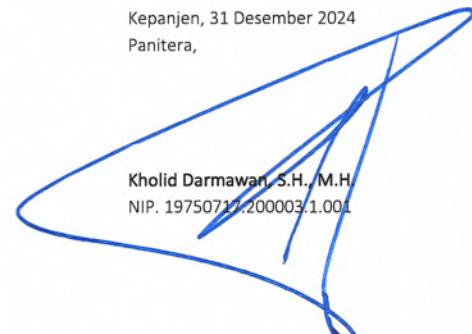
**PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Kasasi			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Putusan Tk. Banding	Daftar Kasasi	Putusan Tk. Kasasi	Dikabulkan	Ditolak Tk. Kasasi	
1	7432/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	13.04.2023	07.06.2023	14.07.2023	17.10.2023		✓	permohonan kasasi ditolak
2	3024/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	21.09.2023	20.11.2023	28.11.2023	23.04.2024		✓	permohonan kasasi ditolak
3	3614/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	12.12.2023	25.01.2024	05.02.2024	19.07.2024		✓	permohonan kasasi ditolak
4	4049/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	15.01.2024	14.03.2024	28.03.2024	26.09.2024		✓	permohonan kasasi ditolak
5	5320/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	31.01.2024	30.05.2024	13.06.2024	30.10.2024		✓	permohonan kasasi ditolak
6	209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	20.03.2024	30.05.2024	24.06.2024				Berkas telah di kirim ke MA RI
7	858/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	24.04.2024	13.06.2024	08.07.2024				Berkas telah di kirim ke MA RI
8	1799/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	30.05.2024	22.07.2024	24.07.2024				Berkas telah di kirim ke MA RI
9	2253/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	17.07.2024	30.08.2024	18.09.2024				Berkas telah di kirim ke MA RI
10	2266/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	26.08.2024	08.10.2024	18.10.2024				Berkas telah di kirim ke MA RI
11	1010/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg	04.11.2024	-	14.11.2024				Berkas telah di kirim ke MA RI
12	1763/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	11.09.2024	06.11.2024	19.11.2024				berkas belum dikirim ke MA RI
13	766/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	12.09.2024	06.11.2024	21.11.2024				berkas belum dikirim ke MA RI
14	2870/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg	02.10.2024	22.11.2024	11.12.2024				berkas belum dikirim ke MA RI



Kepanjen, 31 Desember 2024
 Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
 NIP. 19750717.200003.1.001



**PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

No	Nomor Perkara	Tanggal					Amar Putusan PK			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Putusan Tk. Banding	Putusan Tk. Kasasi	Daftar PK	Putus PK	Dikabulkan	Ditolak Tk. PK	Tidak dapat diterima Tk. PK	
1	5360/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	15/11/2022	16/01/2023	09/06/2023	20/09/2023	31/01/2024		✓		Permohonan PK di Tolak
2	2458/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	28/09/2021	02/12/2021	-	29/11/2023	23/04/2024		✓		Permohonan PK di Tolak
3	3712/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	09/11/2023	-	-	17/04/2024	26/11/2024		✓		Permohonan PK di Tolak
4	962/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg	20/08/2019	-	-	07/05/2024	30/10/2024		✓		Permohonan PK di Tolak
5	3024/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	21/09/2023	20/11/2023	23/04/2024	12/08/2024	13/12/2024				Berkas telah di kirim ke MA RI



Kepanjen, 31 Desember 2024
Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
NIP. 19750717.200003.1.001

**LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

No	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Diterima Tahun ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih dalam proses	Sisa Perkara Tahun ini	Keterangan
					Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	394	7986	7753	627	315	312	0	0	394	



Kepanjen, 31 Desember 2024
Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
NIP. 19750717200003.1.001

**LAPORAN LAYANAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

No	Bulan	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah	Sisa	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Januari	Rp 100.000.000	0	0	Rp 100.000.000	525	
2	Februari	Rp 100.000.000	0	0	Rp 100.000.000	405	
3	Maret	Rp 100.000.000	16.798.000	16.798.000	Rp 83.202.000	313	
4	April	Rp 100.000.000	6.660.000	23.458.000	Rp 76.542.000	310	
5	Mei	Rp 100.000.000	5.920.000	29.378.000	Rp 70.622.000	575	
6	Juni	Rp 100.000.000	6.660.000	36.038.000	Rp 63.962.000	429	
7	Juli	Rp 100.000.000	6.660.000	42.698.000	Rp 57.302.000	512	
8	Agustus	Rp 100.000.000	10.212.000	52.910.000	Rp 47.090.000	521	
9	September	Rp 100.000.000	9.768.000	62.678.000	Rp 37.322.000	560	
10	Oktober	Rp 100.000.000	8.880.000	71.558.000	Rp 28.442.000	441	
11	November	Rp 100.000.000	10.212.000	81.770.000	Rp 18.230.000	396	
12	Desember	Rp 100.000.000	18.204.000	99.974.000	Rp 26.000	313	
JUMLAH		Rp 100.000.000	Rp 99.974.000	Rp 99.974.000	Rp 26.000	5300	


 Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,
 Drs. H. Misbah, M.H.I
 NIP. 1971002.199603.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
 Panitera,

Kholid Darmawan, S.H., M.H.
 NIP. 19750717.200003.1.001

DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DESEMBER TAHUN 2024

LAMPIRAN-10

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JABATAN	MASA KERJA SESUAI SK PANGKAT TERAKHIR							KENAIKAN YAD	TANGGAL	KETERANGAN
							PANGKAT	GOL	TMT	TH	BLN	PANGKAT	GAJI BERKALA	PENSUIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	Drs. H. Misbah, M.H.I.	19651203.199003.1.001	L	Sumenep,	03-12-1965	Ketua / Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2023	31	1	01-04-2027	01-03-2024		01-01-2030	
2	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	19630510.198903.1.004	L	Lamongan,	10-05-1963	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2021	30	1	01-04-2025	01-03-2023		01-06-2028	
3	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	L	Blitar,	05-01-1967	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	27	1	01-04-2023	01-03-2024		01-02-2032	
4	Drs. Achmad Suyuti, M.HES.	19670308.199403.1.003	L	Malang,	03/08/1967	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	27	1	01-04-2023	01-03-2024		01-02-2032	
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	19700407.199403.2.002	P	Blitar,	07-04-1970	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	28	1	01-04-2026	01-03-2026		01-05-2035	
6	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	L	Gresik,	25-09-1966	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	28	1	01-04-2026	01-03-2024		01-10-2031	
7	Drs. Munasik, M.H.	19680602.199403.1.005	L	Bangkalan,	02-06-1968	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	28	1	01-04-2026	01-03-2026		01-07-2033	
8	Drs. Muhammad Zainuri, M.H.	19680826.199403.1.005	L	Mojokerto,	26-08-1968	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	25	1	01-04-2024	01-03-2026		01-08-2033	
9	Drs. H. Shobirin M.H.	19701005.199603.1.003	L	Magetan,	05-10-1970	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2024	28	1	01-04-2028	01-03-2024		01-11-2035	
10	Drs. Ah. Fudloli, M.H.	19650127.199303.1.002	L	Surabaya,	27-01-1965	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2021	28	1	01-04-2025	01-03-2025		01-02-2030	
11	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	L	Gresik,	24-02-1961	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2022	28	7	01-10-2026	01-03-2024		01-03-2027	
12	Wahib Latukau, S.H.I.	19810521.200704.1.001	L	Maluku Tengah,	21-05-1981	Hakim/Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a	01-10-2021	14	6	01-10-2025	01-04-2025		01-06-2046	
13	Kholid Darmawan, S.H.	19750717.200003.1.001	L	Jember,	17-07-1975	Panitera	Pembina Tk. I	IV/b	01-04-2020	20	1	-	01-03-2024		01-08-2033	Pangkat Maksimal
14	Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.	19820205.200604.1.005	L	Sidoarjo,	05-02-1982	Sekretaris	Pembina	IV/a	01-10-2023	14	2	01-10-2027	01-10-2023		01-03-2040	
15	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	19810825.200604.1.003	L	Kediri,	25-08-1981	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I	III/d	01-10-2023	12	6	01-10-2027	01-03-2023		01-09-2041	
16	Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	P	Tidore Kepulauan,	11-08-1969	Panitera Muda Permohonan	Penata Tk. I	III/d	01-10-2024	27	0	01-10-2028	01-10-2023		01-09-2029	
17	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	P	Malang,	31-08-1985	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk. I	III/d	01-04-2023	12	0	01-04-2027	01-04-2023		01-09-2045	
18	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	L	Surabaya,	04-04-1975	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	01-10-2020	10	10	01-10-2024	01-12-2023		01-05-2033	
19	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	L	Sumenep,	18-07-1980	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pele	Penata Tk. I	III/d	01-04-2021	15	1	01-04-2025	01-03-2024		01-08-2038	
20	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	P	Lumajang,	11-04-1987	Kasubbag Kepegawai, Ortala	Penata Tk. I	III/d	01-10-2024	11	10	01-10-2028	01-12-2024		01-05-2045	
21	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	P	Tuban,	08-08-1969	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-10-2017	22	10	-	01-12-2024	01-09-2029	Pangkat Maksimal	
22	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	L	Nganjuk,	08-08-1968	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-04-2009	12	0	-	01-03-2023	01-09-2028	Pangkat Maksimal	
23	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	P	Blitar,	27-10-1966	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-10-2017	17	7	-	01-03-2024		01-11-2026	Pangkat Maksimal
24	Hj. Mustiyah, S.H., M.H.	19680708.198903.2.001	P	Probolinggo,	08-07-1968	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2023	29	1	-	01-03-2024		01-08-2028	Pangkat Maksimal
25	Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H.	19770619.200502.2.001	P	Pacitan,	19-06-1977	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-04-2022	12	1	01-04-2026	01-02-2024		01-07-2037	
26	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	L	Malang,	14-11-1978	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-10-2023	15	7	01-10-2027	01-03-2024		01-12-2038	
27	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	L	Malang,	19-12-1974	Panitera Pengganti	Penata	III/c	01-04-2024	19	6	01-04-2028	01-10-2024		01-01-2035	
28	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	P	Banyuwangi,	09-10-1978	Panitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2022	18	3	01-10-2026	01-07-2024		01-11-2038	
29	Ismail, S.H., M.H.	19730303.201408.1.001	L	Malang,	03-03-1973	Panitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2024	24	9	01-10-2028	01-01-2024		01-04-2033	
30	Tomi Lustoro, S.H.	19870424.200604.1.003	L	Bandar Lampung,	24-04-1987	Panitera Pengganti	Penata Muda	III/a	01-04-2022	11	0	01-04-2026	01-04-2023		01-04-2047	
31	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	19940421.201903.2.012	P	Malang,	21-04-1994	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2023	4	1	01-04-2027	01-03-2025		01-05-2054	
32	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	P	Malang,	24-03-1987	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b	01-04-2023	4	1	01-04-2027	01-03-2023		01-04-2045	
33	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	19940918.202012.2.007	P	Malang,	18-09-1994	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	01-07-2022	1	7	01-12-2024	01-12-2024		01-10-2052	
34	Dhimas Adityarahan Pamungkas, S.Ak	19950714.202203.1.004	L	Jombang,	14-07-1995	Klerk - Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024		01-08-2053	

35	Sindy Siska Silvana, S.H.	19960913.202203.2.016	P	Bantul,	13-09-1996	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	19-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-10-2054	
36	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	P	Sorong,	11-02-1999	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-03-2057	
37	M. Reformis Alfath, S.H.	19980610.202203.1.009	L	Ponorogo,	10-06-1998	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-07-2056	
38	Suci Kurniawati Putri, S.H.	19970112.202203.2.016	P	Pamekasan,	12-01-1997	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-02-2055	
39	Muhammad Aqwam Thariq, S.H.	19970906.202203.1.010	L	Kota Waingapu,	06-09-1997	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-10-2055	
40	Nadzirotus Sintya Falady, S.H.	20000418.202203.2.003	P	Malang,	18-04-2000	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-05-2058	
41	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H	19990819.202203.2.005	P	Malang,	19-08-1999	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-09-2057	
42	Yahya Sultoni, S.H.	19910822.202203.1.004	L	Malang,	22-08-1991	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-09-2050	
43	Beni Asri, SH	19940312.202203.1.010	L	Mojokerto,	12-03-1994	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-03-2022	1	0	01-04-2026	01-03-2024	01-04-2052	
44	Muhamad Alfan	19690904.201405.1.002	L	Malang,	04-09-1969	Jurusita	Pengatur	II/c	01-10-2022	25	0	01-10-2026	01-10-2024	01-10-2027	
45	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	P	Malang,	23-12-1996	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/c	03-01-2022	4	1	01-12-2024	01-12-2024	01-01-2055	
46	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	P	Malang,	13-02-1994	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c	01-03-2022	4	0	01-04-2026	01-03-2024	01-03-2052	
47	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	L	Malang,	10-06-1994	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c	01-03-2022	4	0	01-04-2026	01-03-2024	01-07-2052	
48	Pamella Devi Lolita S.H.	19910718.202405.2.001	P	Malang,	18-07-1991	CPNS Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-05-2024	0	0	01-06-2028	01-05-2026	01-08-2050	
49	Ayu Atika Rahmi S.H.	19960220.202405.2.001	P	Probolinggo,	20-02-1996	CPNS Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-05-2024	0	0	01-06-2028	01-05-2026	01-03-2055	
50	Firly Amalia Rafi Ridha S.H.	20000307.202405.2.001	P	Malang,	07-03-2000	CPNS Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-05-2024	0	0	01-06-2028	01-05-2026	01-04-2058	
51	Nabila Ghina Nugraha, A.Md	19971118.202321.2.009	P	Tangerang,	18-11-1997	Arsiparis Pelaksana/Terampil	-	VII	01-09-2023	-	-	01-09-2025	-		



Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs.H. MISBAH, M.H.I.

NIP. 19651203199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024

Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.

NIP. 19820205.200604.1.005

DATA PEGAWAI PPNPN DIPA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 11

NO	NAMA PEGAWAI	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
1	Beny Suprayogi	L	Jember,	20-11-1967	Satpam
2	Yulianto	L	Malang,	29-04-1986	Pramubakti
3	M. Imron	L	Sampang,	12-03-1975	Pramubakti
4	Muchamad Diki Fardiansyah, S.H.	L	Malang,	04-11-1989	Pramubakti
5	Muhabik Yusyafara	L	Malang,	08-07-1988	Pramubakti (Mengundurkan diri per-1 November 2024)
6	Moh. Rizza Suryanatha, S.P., S.H.	L	Surabaya,	01-10-1980	Pramubakti
7	Neneng Kusrini	P	Sumenep,	31-10-1974	Pramubakti
8	Maulidin Alfa Hikmawan	L	Madiun,	25-12-1982	Pengemudi
9	Moh. Saezal D.P.P.	L	Madiun,	03-03-1988	Pramubakti
10	Trami Utari, S.H	P	Malang,	13-10-1990	Pramubakti
11	Masyhudi	L	Malang,	22-12-1970	Satpam
12	Slamet	L	Malang,	11-12-1973	Cleaning Service
13	Basori, S.H.	L	Malang,	06-12-1994	Pramubakti
14	Dian Maulidah, S.H.	P	Malang,	19-10-1991	Pramubakti
15	Nanik Erma Nuraini, S.T.	P	Malang,	19-07-1973	Pramubakti
16	Wahid Suryono, S.H.	L	Pamekasan,	26-02-1990	Pramubakti
17	Anas Makruf Maulidi, S.Kom., S.H.	L	Pamekasan,	04-09-1993	Pramubakti
18	Yudhianto Wijaya	L	Malang,	15-06-1981	Satpam
19	Imawati Mahmudah, S.H.	P	Malang,	15-04-1996	Pramubakti
20	Aditya Rahman Mubarok, S.H.	L	Jombang,	08-05-1994	Pramubakti
21	Sundra Murti, S.Pd.	L	Probolinggo,	17-08-1993	Pramubakti
22	Nofita Indah Fitria, S.H.	P	Malang,	05-11-2001	Pramubakti
23	Achmad Saied Yudho Prasetyo	L	Malang,	04-09-1983	Pramubakti (PPNPN per-1 November)



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. MSRAH, M.H.I.

NIP. 19651203199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024

Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.

NIP. 19820205.200604.1.005

**DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

LAMPIRAN - 12

NO	N A M A	PANGKAT/ GOL. LAMA	PANGKAT/ GOL. BARU	MASA KERJA		TMT	SURAT KEPUTUSAN			KET.
				TAHUN	BULAN		SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	
1	Drs. SHOBIRIN, M.H.	IV/c	IV/d	28	1	1 April 2024	Presiden RI	00068/KEP/AA/15001/24	29 Februari 2024	
2	ZAINUL FANANI, S.H., M.H.	III/b	III/c	19	6	1 April 2024	KMA RI	64/KMA/SK.KP2.1.1/III/2024	15 Maret 2024	
3	HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.	III/c	III/d	27	0	1 Oktober 2024	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1130/DJA/SK.KP2.1.1/VIII/2024	28 Agustus 2024	
4	KHUSNUL AINI, S.H., M.H.	III/c	III/d	11	10	1 Oktober 2024	Ketua PTA Surabaya	3781/KPTA.W13-A/SK.KP2.1.1/VIII/2024	21 Agustus 2024	
5	ISMAIL, S.H., M.H.	III/b	III/c	24	9	1 Oktober 2024	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1129/DJA/SK.KP2.1.1/VIII/2024	28 Agustus 2024	
6	VENNY ALVIONITA, A.Md.	II/c	II/d	7	0	1 Desember 2024	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	2026/DJA/SK.KP2.1.1/XI/2024	11 November 2024	



Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris


ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.
NIP. 19820205.200604.1.005

**DATA PEGAWAI YANG KENAIKAN GAJI BERKALA
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

LAMPIRAN - 13

NO	N A M A	PANGKAT / GOL.	TMT KGB	MASA KERJA		SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	GAJI POKOK LAMA	GAJI POKOK BARU
				TAHUN	BULAN					
1	Ismail, S.H., M.H.	III/b	01 Januari 2024	24	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	7800/KPA.W13-A35/KP.04.2/XII/2023	01 Desember 2023	3.781.400	3.900.500
2	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	III/d	01 Februari 2024	14	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0423/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	10 Januari 2023	3.518.100	3.628.900
3	Drs. H. Misbah, M.H.I.	IV/d	01 Maret 2024	32	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0919/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	05 Februari 2024	5.488.800	6.114.500
4	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	IV/c	01 Maret 2024	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0920/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	05 Februari 2024	4.798.300	5.345.200
5	Drs. Abd. Rouf, M.H.	IV/d	1 Maret 2024	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0923/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	5.321.200	5.927.800
6	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	IV/d	1 Maret 2024	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0922/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	5.321.200	5.927.800
7	Drs. A. Bashori, M.A.	IV/d	1 Maret 2024	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0924/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	5.321.200	5.927.800
8	Drs. H. Shobirin, M.H	IV/c	01 Maret 2024	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0982/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	06 Februari 2024	4.949.400	5.513.600
9	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	IV/d	01 Maret 2024	32	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0921/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	05 Februari 2024	5.488.800	6.114.500
10	Junaidi Syampurno, S.H.	III/d	1 Maret 2024	18	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0925/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	05 Februari 2024	3.743.100	4.169.900
11	Dra. Hj. Siti Djayadarlinggar, M.H.	IV/a	1 Maret 2024	24	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0926/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	05 Februari 2024	4.281.800	4.770.000
12	Hj. Mustiyah, S.H., M.H.	IV/a	1 Maret 2024	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0927/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	05 Februari 2024	4.699.300	5.235.000
13	Fuad Hamid Aldjufr, S.H., M.H.	IV/a	1 Maret 2024	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0928/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	4.416.700	4.920.200
14	Umar Tajudin S.H.	III/d	1 Maret 2024	16	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	1430/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	3.628.900	4.042.500
15	Dhimas Adityarahanman Pamungkas, S.Ak	III/a	1 Maret 2024	2	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0929/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.579.400	2.873.500
16	Sindy Siska Silvana, S.H.	III/a	1 Maret 2024	2	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0930/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.579.400	2.873.500
17	Zidna Mazidah, S.H.	III/a	1 Maret 2024	2	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0931/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.579.400	2.873.500
18	Mochammad Yoesuf, S.H.	III/a	1 Maret 2024	2	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0896/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.579.400	2.873.500
19	M. Reformis Alfath, S.H.	III/a	1 Maret 2024	2	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0938/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.579.400	2.873.500
20	Yahya Sultoni, S.H.	III/a	1 Maret 2024	2	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0934/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.579.400	2.873.500
21	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	II/a	1 Maret 2024	4	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0932/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.301.800	2.564.200
22	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	II/a	1 Maret 2024	4	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	0933/KPA.W13-A35/KP2.1.2/I/2024	5 Februari 2024	2.301.800	2.564.200
23	Sutaji, S.H., M.H.	IV/a	1 Juni 2024	32	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	2064/KPA.W13-A35/KP2.1.2/IV/2024	30 April 2024	5.266.100	5.866.400
24	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	III/c	1 Juli 2024	20	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	2549/KPA.W13-A35/KP2.1.2/VII/2024	03 Juni 2024	3.704.300	4.126.600
25	Zainul Fanani, S.H., M.H.	III/c	1 Oktober 2024	20	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	4046/KPA.W13-A35/KP2.1.2/IX/2024	03 September 2024	4.000.600	4.126.600
26	Muhammad Alfan	II/c	1 Oktober 2024	27	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	4047/KPA.W13-A35/KP2.1.2/IX/2024	03 September 2024	3.237.500	3.606.500
27	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	IV/a	1 Desember 2024	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	4996/KPA.W13-A35/KP2.1.2/XI/2024	1 November 2024	4.699.300	5.235.000
28	Khusnul Ainii, S.H., M.H.	III/d	1 Desember 2024	12	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	4997/KPA.W13-A35/KP2.1.2/XI/2024	1 November 2024	3.683.400	3.799.400
29	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	III/a	1 Desember 2024	4	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	4998/KPA.W13-A35/KP2.1.2/XI/2024	1 November 2024	2.660.700	2.964.000
30	Venny Alvionita A.Md.	II/c	1 Desember 2024	7	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	4999/KPA.W13-A35/KP2.1.2/XI/2024	1 November 2024	2.374.300	2.645.000



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. MISBAH, M.H.I.
NIP. 951203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.
NIP. 19820205.200604.1.005

DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI MASUK PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 14

NO.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN			KET.
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	Drs. H. Shobirin, M.H.	197010051996031003	IV/c	Pengadilan Agama Ngawi Kelas IB	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Utama	Hakim Madya Utama	38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024	29 Januari 2024	07 Februari 2024	
2	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	196305101989031000	IV/c	Pengadilan Agama Banyuwangi 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Wakil Ketua	Wakil Ketua	119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024	13 Mei 2024	27 Mei 2024	
3	Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.	198202052006041005	IV/a	Pengadilan Agama Jombang 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Sekretaris	Sekretaris	2749/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024	29 April 2024	08 Mei 2024	
4	Kholid Darmawan, S.H.	197507172000031001	IV/b	Pengadilan Agama Lumajang 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera	Panitera	503/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	11 Juni 2024	05 Juli 2024	
5	Drs. Ah. Fudholi, M.H.	196501271993031002	IV/d	Pengadilan Agama Pemalang 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	24 Oktober 2024	
6	Drs. Achmad Suyuti, M. HES.	196703081994031003	IV/d	Pengadilan Agama Malang 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	24 Oktober 2024	
7	Drs. Muhammad Zainuri, M.H.	196808261994031005	IV/d	Pengadilan Agama Lumajang 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	24 Oktober 2024	
8	Drs. Munasik, M.H.	196806021994031005	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Kediri 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	24 Oktober 2024	
9	Wahib Latukau, S. HI.	198105212007041000	IV/a	Pengadilan Agama Kab. Madiun 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Madya Pratama	Hakim Madya Pratama	215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	24 Oktober 2024	
10	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	199404212019032012	III/b	Pengadilan Agama Pasuruan 1A	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	2081/DJA/SK.KP4.1.3/XI/2024	15 November 2024	11 Desember 2024	



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. ISBAH, M.H.
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.
NIP. 19820205.200604.1.005

**DAFTAR PEGAWAI YANG PINDAH / MUTASI KELUAR TEMPAT BEKERJA
PADA PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN 2024**

LAMPIRAN - 15

No.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN			KET.
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR SURAT	TANGGAL	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.	196410071990032001	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	Hakim Utama Muda	Hakim Tinggi PTA	38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024	29 Januari 2024	13 Februari 2024	
2	Drs. H. Warita Anwar, M.H.E.S.	196308031991031003	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Tinggi Agama Kaltara	Hakim Utama Muda	Hakim Tinggi PTA	38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024	29 Januari 2024	12 Februari 2024	
3	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H	197408071998032001	IV/c	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Agama Kota Malang	Wakil Ketua	Ketua	119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024	13 Mei 2024	27 Mei 2024	
4	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	196503151993032003	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Agama Surabaya	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024	13 Mei 2024	28 Mei 2024	
5	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H.	198709262011011000	III/c	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Agama Kraksaan	Panitera Pengganti	Panmud. Gugatan	485/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	11 Juni 2024	10 Juli 2024	
6	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	196502091993031002	IV/b	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Panitera	Panitera Pengganti PTA	502/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	11 Juni 2024	02 Juli 2024	
7	Sutaji, S.H., M.H	196808091992031000	IV/c	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Agama Surabaya	Hakim Madya Utama	Hakim Madya Utama	215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	01 November 2024	
8	Drs. Fahrurrazi, M.H.I.	196006051987031003	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Agama Banjarmasin	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	215/KMA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	31 Oktober 2024	
9	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	196505261998031001	IV/a	Pengadilan Agama Kab. Malang	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti PTA	1596/DJA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	07 November 2024	



Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205.200604.1.005

DATA CUTI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 16

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	LAMA CUTI	MULAI s/d SELESAI	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	III/d	Panitera Pengganti	3 hari	02 s.d. 04 Januari 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
2	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	04 s.d. 05 Januari 2024	Cuti Sakit	Sakit
3	Mochammad Yoesuf S.H.	19900503.202203.1.003	III/a	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	1 hari	16 Januari 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
4	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	III/d	Kasubbag. Umum dan Keuangan	3 hari	17 s.d. 19 Januari 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	19700407.199403.2.002	IV/d	Hakim Utama Muda	6 hari	19 s.d. 26 Januari 2024	Cuti Sakit	Sakit
6	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	12 s.d. 13 Februari 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
7	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	4 hari	12 s.d. 16 Februari 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
8	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	12 s.d. 13 Februari 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
9	Nadzirotus Sintya Falady, S.H.	20000418.202203.2.003	III/a	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	1 hari	06 Februari 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
10	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H	19990819.202203.2.005	III/a	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	1 hari	06 Februari 2024	Cuti Sakit	Sakit
11	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201406.2.002	III/c	Panitera Pengganti	4 hari	19 s.d. 22 Februari 2024	Cuti Alasan Penting	Ibu Mertua Meninggal
12	Muhammad Aqwam Thariq, S.H.	19970906.202203.1.010	III/a	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	4 hari	04 s.d. 07 Maret 2024	Cuti Sakit	Sakit
13	Drs. H. Shobirin, M.H.	19701005.199603.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	22 Maret 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
14	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	II/c	Pengelola Penanganan Perkara	2 hari	25 s.d. 26 Maret 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
15	Djazilatur Rachmachi, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	IV/a	Panitera Pengganti	2 hari	16 s.d. 17 April 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
16	Suci Kurniawati Putri, S.H.	19970112.202203.2.016	III/a	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	1 hari	01 April 2024	Cuti Sakit	Sakit
17	Yunita Eka Widayasi, S.H., M.H.	19770619.200502.2.001	III/d	Panitera Pengganti	1 hari	22 April 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
18	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	22 April 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
19	Nabila Ghina Nugraha, A.Md	19971118.202321.2.009	VII	Arsiparis Terampil/Pelaksana	2 hari	23 s.d. 24 April 2024	Cuti Sakit	Sakit
20	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	29 s.d. 30 April 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
21	Hj. Mustiyah, S.H., M.H.	19680708.198903.2.001	IV/a	Panitera Pengganti	2 hari	02 s.d. 03 Mei 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
22	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	19810825.200604.1.003	III/d	Panitera Muda Hukum	42 hari	13 Mei s.d. 12 Juli 2024	Cuti Besar	Ibadah Haji
23	Hanum Shirotu Nida S. Kom.	19940918.202012.2.007	III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	3 bulan	13 Mei s.d. 13 Agustus 2024	Cuti Melahirkan	Cuti Melahirkan anak ke-2
24	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	III/b	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	3 hari	06 s.d. 08 Mei 2024	Cuti Sakit	Sakit
25	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	19650209.199303.1.002	IV/b	Panitera	2 hari	21 s.d. 22 Mei 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
26	Fuad Hamid Aldjufrui, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	IV/a	Panitera Pengganti	3 hari	04 s.d. 06 Juni 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
27	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	19 Juni 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
28	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	II/c	Jurusita	2 hari	20 s.d. 21 Juni 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
29	Dhimas Adityarahan P., S.Ak	19950714.202203.1.004	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	1 hari	19 Juni 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
30	Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.	19820205.200604.1.005	IV/a	Sekretaris	3 hari	19 s.d. 21 Juni 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
31	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	II/c	Pengelola Penanganan Perkara	1 hari	02 Juli 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
32	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	III/c	Panitera Pengganti	1 hari	04 Juli 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
33	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	II/c	Jurusita Pengganti	1 hari	08 Juli 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
34	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	III/c	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	1 hari	08 Juli 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
35	Kholid Darmawan, S.H., S.H.	19750717.200003.1.001	IV/b	Panitera	1 hari	09 Juli 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
36	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	III/d	Panitera Muda Gugatan	2 hari	15 s.d. 16 Juli 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
37	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	19630510.198903.1.004	IV/c	Wakil Ketua	1 hari	15 Juli 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
38	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	IV/a	Panitera Pengganti	1 hari	02 Agustus 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
39	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	III/d	Panitera Pengganti	1 hari	19 Agustus 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
40	Drs. H. Misbah, M.H.I.	19651203.199003.1.001	IV/d	Ketua	2 hari	20 s.d. 23 September 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
41	Ismail, S.H., M.H.	19730303.201408.1.001	III/c	Panitera Pengganti	1 hari	28 Oktober 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
42	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	III/d	Panitera Muda Permohonan	2 hari	24 s.d. 25 Oktober 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
43	Wahib Latukau, S.HI.	19810521.200704.1.001	IV/a	Hakim Madya Pratama	1 hari	25 Oktober 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
44	Drs. Muhammad Zainuri, M.H.	19680826.199403.1.005	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	28 November 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga

45	Muhamad Alfan	19690904.201405.1.002	II/c	Jurusita	1 hari	28 November 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
46	Firly Amalia Rafi Ridha S.H.	20000307.202405.2.001	III/a	CPNS APP	1 hari	04 Desember 2024	Cuti Sakit	Sakit
47	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	27 s.d.31 Desember 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
48	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	III/a	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	3 hari	23 s.d. 27 Desember 2024	Cuti Alasan Penting	Menikah
49	M. Reformis Alfath, S.H.	19980610.202203.1.009	III/a	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	3 hari	23 s.d. 27 Desember 2024	Cuti Alasan Penting	Menikah
50	Drs. Achmad Suyuti, M.HES.	19670308.199403.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	16 s.d. 18 Desember 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
51	Drs. Ah. Fudlolli, M.H.	19650127.199303.1.002	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	31 Desember 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
52	Wahib Latukau, S.H.I.	19810521.200704.1.001	IV/a	Hakim Madya Pratama	1 hari	27 Desember 2024	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga



Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205.200604.1.005

DAFTAR PEGAWAI YANG PROMOSI PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 17

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	KET
				Dari	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.	196410071990032001	IV/d	Ketua MA RI	38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024	29 Januari 2024	13 Februari 2024	Hakim Tk.I menjadi Hakim Tinggi PTA Palangkaraya
2	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.	196308031991031003	IV/d	Ketua MA RI	38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024	29 Januari 2024	12 Februari 2024	Hakim Tk.I menjadi Hakim Tinggi PTA Kaltara
3	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H	197408071998032001	IV/c	Ketua MA RI	119/KMA/SK.KP4.1.3/V/2024	13 Mei 2024	27 Mei 2024	Wakil Ketua menjadi Ketua PA Kota Malang
4	Ahmad Fathoni Arfan, S.Kom., S.H., M.H	198709262011011000	III/c	Dirjen Badilag MA RI	485/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	11 Juni 2024	10 Juli 2024	PP menjadi Panmud Gugatan
5	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	196502091993031002	IV/b	Dirjen Badilag MA RI	502/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024	11 Juni 2024	02 Juli 2024	Panitera menjadi PP PTA Surabaya
6	Fuad Hamid Aldjufrin, S.H., M.H.	196505261998031001	IV/a	Dirjen Badilag MA RI	1596/DJA/SK.KP4.1.3/X/2024	10 Oktober 2024	07 November 2024	PP menjadi PP PTA Surabaya



Mengabdi,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. MISBAH, M.H.
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205.200604.1.005

DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 18

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	Masa Kerja Golongan		KET
				Dari	Nomor	Tanggal		Tahun	Bulan	
				5	6	7		8	9	
1	YUSSI CANDRA RUDIANSYAH, S.H., M.H.	19660119.198703.1.001	IV/a	Sekretaris Mahkamah Agung RI	00857/13001/AZ/11/23	21 November 2023	01 Februari 2024	28	9	



Mengetahui,
Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. MISBAH, M.H.I.
NIP. 19661203199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205.200604.1.005

DATA PELATIHAN / DIKLAT UNTUK TENAGA TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 19

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN / DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	Drs. H. Misbah, M.H.I.	Ketua	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
2	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
3	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing

4	Drs. Achmad Suyuti, M.HES.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Pelatihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)	Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Tanggal 07 s.d. 10 Agustus 2024	di Novotel Semarang Jl Pemuda 123, Semarang Jawa Tengah
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
6	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
7	Drs. Munasik, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing

			Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
8	Drs. Muhammad Zainuri, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
9	Drs. H. Shobirin M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
10	Drs. Ah. Fudloli, M.H.	Hakim Utama Muda	Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
11	Drs. A. Bashori, M.A.	Hakim Madya Utama	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
12	Wahib Latukau, S.H.I.	Hakim Madya Pratama	Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing

			Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP (penerimaan Negara Bukan Pajak) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2024	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024	Baobab Safari Resort Gn. Princi, Jatiarjo, Kec. Prigen, Pasuruan Jawa Timur
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
13	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
14	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
15	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H	Panitera Muda Permohonan	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Pelatihan Pengembangan Alat Mekanisme Monev Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang	Tanggal 07-08 Oktober 2024	Hotel Aria Centra Surabaya Jl. TAIS Nasution No.37 Surabaya
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing

			Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
16	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
17	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
18	Fuad Hamid Aldjufr, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
19	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
20	Hj. Mustiyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlwanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing

			Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
21	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
22	Umar Tajudin, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
23	Mastur, S.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
24	Zainul Fanani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing

			Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
25	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
26	Ismail, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
27	Tomi Lustoro, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Contra Legem	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	17 Mei 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing
28	Muhamad Alfan	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing

		Bimbingan Teknis "Perlawanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing	
29	Venny Alvionita A.Md.	Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	26 Juli 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	23 Agustus 2024	Satuan kerja masing-masing
			Tata Kelola Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	27 September 2024	Satuan kerja masing-masing
			Bimbingan Teknis "Perlawanan Eksekusi"	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	15 November 2024	Satuan kerja masing-masing



Kepanjen, 31 Desember 2024

Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.

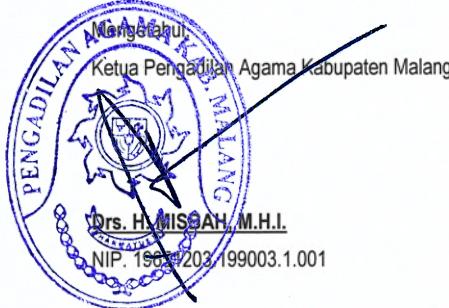
NIP. 19820205.200604.1.005

DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 20

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Drs. H. Misbah, M.H.I.	19651203.199003.1.001	Ketua / Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
2	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	19630510.198903.1.004	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
3	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
4	Drs. Achmad Suyuti, M.HES.	19670308.199403.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	19700407.199403.2.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
6	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
7	Drs. Munasik, M.H.	19680602.199403.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
8	Drs. Muhammad Zainuri, M.H.	19680826.199403.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
9	Drs. H. Shobirin M.H.	19701005.199603.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
10	Drs. Ah. Fudloli, M.H.	19650127.199303.1.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
11	Drs. A. Bashori, M.A.	19610224.199403.1.001	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
12	Wahib Latukau, S.H.I.	19810521.200704.1.001	Hakim/Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a
13	Kholid Darmawan, S.H.	19750717.200003.1.001	Panitera	Pembina Tk. I	IV/b
14	Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.	19810825.200604.1.003	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I	III/d
15	Hadjiah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	Panitera Muda Permohonan	Penata Tk. I	III/d
16	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	Panitera Muda Gugatan	Penata Tk. I	III/d
17	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
18	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d
19	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
20	Hj. Mustiyah, S.H., M.H.	19680708.198903.2.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a
21	Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H.	19770619.200502.2.001	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d
22	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d
23	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata	III/c
24	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	Panitera Pengganti	Penata	III/c
25	Ismail, S.H., M.H.	19730303.201408.1.001	Panitera Pengganti	Penata	III/c

26	Tomi Lustoro, S.H.	19870424.200604.1.003	Panitera Pengganti	Penata Muda	III/a	
27	Rizky Ananda Putri, S.H., M.H.	19940421.201903.2.012	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk.I	III/b	
28	Muhamad Alfan	19690904.201405.1.002	Jurusita	Pengatur	II/c	
29	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/d	



Kepanjen, 31 Desember 2024

Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.

NIP. 19820205.200604.1.005

DATA PELATIHAN/DIKLAT UNTUK TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 21

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN/DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	Dhimas Adityarahan Pamungkas, S.Ak.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 1	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP	Pembelajaran Mandiri (15 Januari 2024 – 29 Februari 2024)	Satuan Kerja masing-masing
			Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan III Tahun 2024	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perpendidikan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	1 Juli 2024 - 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing
2	Sindy Siska Silvana, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
3	Zidna Mazidah, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
4	M. Reformis Alfath, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
5	Suci Kurniawati Putri, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e- Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor

6	Muhammad Aqwam Thariq, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
7	Nadzirotus Sintya Falady, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
8	Hanandy Naufi Fatca Shafira, S.H	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
9	Yahya Sultoni, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
10	Beni Asri, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 13 s.d. 24 Mei 2024 dan Klasikal tanggal 26 Mei s.d. 5 Juli 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor
			Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Agama Angkatan IV Gelombang 3	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Mandiri e-Learning tanggal 30 September s.d. 11 Oktober dan Klasikal tanggal 14 Oktober s.d. 22 November 2024	Satuan Kerja masing-masing dan Pusdiklat MARI Megamendung, Bogor

11	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Bendahara Pengeluaran	Bimtek Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran Melalui SAKTI	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Malang	01 Maret 2024	Gedung RCE Center, Gedung Cagar Budaya KPPN Malang, Jl. Merdeka Selatan No. 1-2, Malang
12	Basori, S.H.	Operator Keuangan	Bimtek Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran Melalui SAKTI	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Malang	01 Maret 2024	Gedung RCE Center, Gedung Cagar Budaya KPPN Malang, Jl. Merdeka Selatan No. 1-2, Malang
13	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubag. Umum dan Keuangan	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch III Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI Wilayah Jakarta	Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdii Mahkamah Agung RI	06 s.d. 08 Mei 2024	Satuan Kerja masing-masing
14	Nabila Ghina Nugraha, A.Md	Arsiparis Terampil	Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAN Versi 2	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang	Tanggal 27 s.d. 29 Mei 2024	Aula KPKNL Malang
15	Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP (penerimaan Negara Bukan Pajak) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2024	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024	Baobab Safari Resort Gn. Princi, Jatiarjo, Kec. Prigen, Pasuruan Jawa Timur
16	Zainul Fanani, S.H., M.H.	Bendahara Penerimaan	Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBP (penerimaan Negara Bukan Pajak) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2024	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024	Baobab Safari Resort Gn. Princi, Jatiarjo, Kec. Prigen, Pasuruan Jawa Timur



Kepanjen, 31 Desember 2024

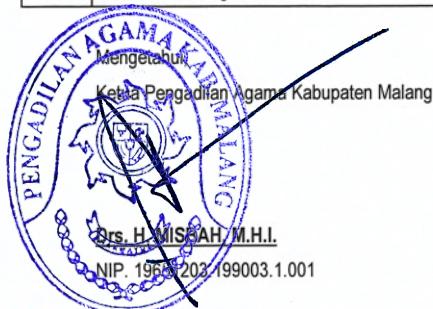
Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205.200604.1.005

DATA TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

LAMPIRAN - 22

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	KETERANGAN
1	Rohmad Darmawan, S.Kom., S.H., M.HP.	19820205.200604.1.005	Sekretaris	Pembina	IV/a
2	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk.I	III/d
3	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk.I	III/d
4	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Penata Tk.I	III/d
5	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Penata Muda Tk.I	III/b
6	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	19940918.202012.2.007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	III/a
7	Dhimas Adityarahan Pamungkas, S.Ak	19950714.202203.1.004	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda	III/a
8	Sindy Siska Silvana, S.H.	19960913.202203.2.016	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
9	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
10	M. Reformis Alfath, S.H.	19980610.202203.1.009	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
11	Suci Kurniawati Putri, S.H.	19970112.202203.2.016	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
12	Muhammad Aqwam Thariq, S.H.	19970906.202203.1.010	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
13	Nadzirotus Sintya Falady, S.H.	20000418.202203.2.003	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
14	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H	19990819.202203.2.005	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
15	Yahya Sultoni, S.H.	19910822.202203.1.004	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
16	Beni Asri, SH	19940312.202203.1.010	Analis Perkara Peradilan / CAKIM	Penata Muda	III/a
17	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c
18	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c
19	Pamella Devi Lolita S.H.	19910718.202405.2.001	CPNS Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a
20	Ayu Atika Rahmi S.H.	19960220.202405.2.001	CPNS Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a
21	Firly Amalia Rafi Ridha S.H.	20000307.202405.2.001	CPNS Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a
22	Nabila Ghina Nugraha, A.Md	19971118.202321.2.009	Arsiparis Pelaksana/Terampil	PPPK	VII



Kepanjen, 31 Desember 2024

Sekretaris

ROHMAD BAHRUDIN, S.Kom., S.H., M.H.

NIP. 19820205.200604.1.005

RINCIAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN 23

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 7.040.181.000	Rp 7.013.382.204	Rp 26.798.796	Terealisasi 99,62%



Menderlami,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. Misbah, M.H.I.
NIP. 19681203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005

REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN 24

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 2.563.224.000	Rp 2.562.926.518	Rp 297.482	Terealisasi 99,99%

Mengetahui :



Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Misbah, M.H.I.

NIP. 19681203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN 25

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 100.000.000	Rp 99.901.123	Rp 98.877	Terealisasi 99,90%

Mengetahui :
 Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. Misbah, M.H.I.
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
 Sekretaris

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 604730 TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

LAMPIRAN 26

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1	Januari	Rp	- Rp	-
2	Pebruari	Rp	- Rp	-
3	Maret	Rp	- Rp	-
4	April	Rp	- Rp	-
5	Mei	Rp	- Rp	-
6	Juni	Rp	- Rp	-
7	Juli	Rp	7.170.000 Rp	-
8	Agustus	Rp	- Rp	-
9	September	Rp	- Rp	-
10	Okttober	Rp	- Rp	-
11	Nopember	Rp	- Rp	-
12	Desember	Rp	9.187.000 Rp	-
		Rp	16.357.000 Rp	NIHIL

Mengatakan :
 Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. M. Rohmad, M.H.I.
 NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
 Sekretaris

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
 NIP. 19820205 200604 1 005

RINCIAN DIPA 04 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

LAMPIRAN 27

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604731)	Rp 185.858.000	Rp 185.832.000	Rp 26.000	Terealisasi 99,99%



Mengatahi:
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Brs. H. Misbah, M.H.I.
NIP. 19651203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 604731 TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

LAMPIRAN 28

NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1	Januari	Rp 82.792.000	Rp 82.792.000	
2	Februari	Rp 53.278.500	Rp 53.278.500	
3	Maret	Rp 45.312.000	Rp 45.312.000	
4	April	Rp 39.796.000	Rp 39.796.000	
5	Mei	Rp 65.476.500	Rp 65.476.500	
6	Juni	Rp 55.454.000	Rp 55.454.000	
7	Juli	Rp 63.738.500	Rp 63.738.500	
8	Agustus	Rp 67.050.000	Rp 67.050.000	
9	September	Rp 63.498.500	Rp 63.498.500	
10	Oktober	Rp 65.137.500	Rp 65.137.500	
11	Nopember	Rp 58.811.000	Rp 58.811.000	
12	Desember	Rp 55.230.000	Rp 55.230.000	
		Rp 715.574.500	Rp 715.574.500	

Mengelanjutkan
Keputusan Pengadilan Agama Kab. Malang,

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris



Drs. Rohmad Bahrudin, M.H.
NIP. 1965231990031.001

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005

DATA KENDARAAN DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

Lampiran 29

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Pemegang SIP	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
I Kendaraan Roda 4							
1	Sedan	2006	V			Panitera	Toyota Camry
2	Sedan	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Timor
3	Station Wagon	2012	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Avanza
4	Station Wagon	2009	V			Sekretaris	Kijang Innova
5	Station Wagon	2015	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kijang Innova
6	Station Wagon		V			Ketua	Kijang Innova (Pinjam Pakai Dari Mahkamah Agung)
7	Station Wagon		V			Wakil Ketua	Kijang Innova (Pinjam Pakai Dari Pemkab. Malang)
II Kendaraan Roda 2							
1	Binter	1999			V		Rusak Berat
2	Honda grand	1999			V		Rusak Berat
3	Win	1999			V		Rusak Berat
4	Shogun	1999			V		Rusak Berat
5	Supra X	2006	V			Ketua	Kendaraan Operasional
6	Supra X	2006	V			Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Kendaraan Operasional
7	Mega Pro	2008	V			Kasubag PTIP	Kendaraan Operasional
8	Mega Pro	2008	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Kendaraan Operasional
9	Mega Pro	2008	V			Panitera Muda Hukum	Kendaraan Operasional



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. H. Misbah, M.H.I.
NIP. 19611203.199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024

Sekretaris


Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005

**DATA RUMAH DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

Lampiran 29

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					NIHIL
1	Ketua					NIHIL
2	Wakil Ketua					NIHIL
3	Hakim					NIHIL
4	Panitera					NIHIL
5	Sekretaris					NIHIL

Kepanjen, 31 Desember 2024



DATA SARANA PRASARANA
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

Lampiran 29

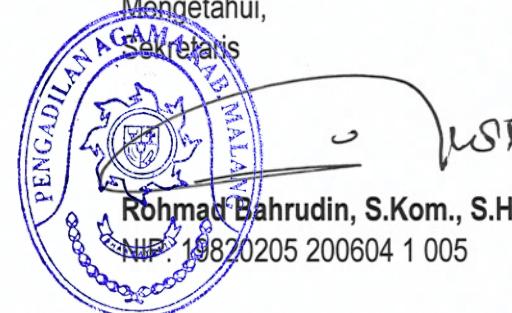
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris	1	
5	Ruang Wakil Panitera	1	
6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Sekretariat	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang Hakim	1	
10	Ruang Rapat Pimpinan	1	
11	Ruang Sidang Utama	1	
12	Ruang Sidang I	1	
13	Ruang Sidang II	1	
14	Ruang Sidang III	1	
15	Ruang Pendaftaran	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Arsip	1	
18	Ruang IT	1	
19	Ruang Tunggu Dalam	1	
20	Ruang Tunggu Luar	1	
21	Ruang Loby LT.1	1	
22	Ruang Loby LT.2	1	
23	Ruang Mediasi	1	
24	Gedung LT 1	1	
25	Gedung LT 2	1	
	Fasilitas Perkantoran		

II	Komputer		
1	P.C Unit	75	
2	Laptop	35	
3	Printer	58	
4	Scanner	4	
5	Proyektor	3	
6	AC	30	
7	Faximile	1	
8	Genset	2	
9	Televisi	8	

Kepanjen, 31 Desember 2024

Mengetahui,

Sekretaris



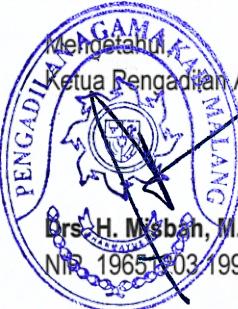
Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.HP.
NIP. 19820205 200604 1 005

LST

JUMLAH SURAT MASUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024

LAMPIRAN 31

NO	KODE SURAT	BULAN												KET	JUMLAH
		J A N U A R I	E B R U A R I	M A R E T	A P R I L	M E I	J U N I I	J U L I I	A G U S T U S S	S E P T E M B E R	O K T O B E R	N O V E M B E R	D E S E M B E R		
1	OT	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	4		9
2	HM	1	1	6	1	2	3	2	1	1	4	4	1		27
3	KP	2	1	2	3	5	1	1	5	2	4	2	1		29
4	KU	0	0	0			2	0	0	0	1	1	2		6
5	KS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6	PL	1	2	0	1	0	3	2	2	1	1	1	1		15
7	HK	108	115	110	155	110	130	89	170	63	150	120	110		1430
8	PP	2	1	3	0	1	0	2	3	4	0	2	1		19
9	PB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		1
10	TBPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1
11	SK	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	2		8
12	TL	0	2	3	1	0	2	3	1	4	1	1	2		20
13	OPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1
	JUMLAH	114	122	125	163	121	142	100	183	77	162	132	125	0	1566



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Drs. H. Misban, M.H.I.
NIP. 196503199003.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005

JUMLAH SURAT KELUAR BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024

LAMPIRAN 32

NO	KODE SURAT	JANUARI	FEBRUARI	MARAPRIL	MEEI	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	KET	JUMLAH	
1	OT	11	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3		17	
2	HM	24	55	15	15	15	10	25	12	14	15	9	12	221	
3	KP	12	15	8	9	5	1	8	15	12	13	15	8	121	
4	KU	22	15	13	19	26	28	35	21	15	25	15	25	259	
5	KS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	PL	9	5	4	3	5	7	4	5	8	4	10	14	78	
7	HK	300	405	306	401	502	425	485	589	308	405	526	352	5004	
8	PP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	PB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	PS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KP	45	25	29	45	62	44	89	21	35	26	2	15	438	
12	SK.PW1	5	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	15	27	
	JUMLAH	378	495	346	447	553	471	558	642	358	462	576	414	0	5700



Kepanjen, 31 Desember 2024
Sekretaris

Rohmad Bahrudin, S.Kom., S.H., M.H.P.
NIP. 19820205 200604 1 005